

Edisi 3
Juni 2020



KASUARI INOVASI

**HIGH
LEVEL
MEETING**

Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau
Provinsi Papua & Papua Barat

**PEMANFAATAN DATA SATELIT
DALAM PERENCANAAN
WISATA HIU PAUS**

Harmonisasi
PERDASUS
Pembangunan
Berkelanjutan

**OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
PADI SAWAH
DI PAPUA BARAT**

**KEARIFAN LOKAL
Kampung Kwok
Pegunungan Arfak**



Seorang warga Manokwari saat memancing di Perairan teluk doreri, manokwari. (alberth yomo/ majalah kasuari inovasi)



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION



Rumah Kaki Seribu dengan modifikasi atap seng di Kampung Kwok, Distrik Hingk. Tampak papan nama Kampung Kwok "kampung partisipasi". JIMMY WANMA

**Salam sejahtera bagi kita semua
Assalamualaikum Wr.Wb**

Salam jumpa kembali para pembaca setia Majalah Kasuari Inovasi di Tahun 2020.

Pertama-tama kami segenap redaksi Majalah Kasuari Inovasi (MKI) patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, penerbitan Majalah Edisi ketiga, Juni Tahun 2020 dapat dirampungkan.

Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dalam mendeskripsikan aktifitas kelitbang dan Inovasi di Papua Barat. Majalah ini terbit setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Desember dan bulan Juni. Pada Edisi ketiga kali ini, isinya sedikit mengalami perubahan dan penambahan susunan rubrik yang ditampilkan, dimana pada edisi ini rubrik yang ditampilkan lebih banyak dari edisi-edisi sebelumnya. Beberapa rubrik tambahan yang ditampilkan dalam edisi ini antara lain: penelitian dan pengembangan (Litbang), Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), suara pembaca dan kolom rubrik promosi.

Topik utama Edisi ketiga adalah Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau (High Level Meeting Green Investment/HLM GI) Papua dan Papua Barat di Sorong Papua Barat. Laporan khusus terkait Provinsi Pembangunan Berkelanjutan untuk membuat dunia lebih baik, Harmonisasi Perdasus Pembangunan Berkelanjutan, Kunjungan Gubernur ke Oransbari Manokwari Selatan dan Satgas Komoditas Unggulan Papua Barat. Sebagai tokoh ditampilkan profil singkat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Selain topik tersebut juga ada rubrik Litbang, Iptek, suara pembaca dan promosi serta Profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Semoga sajian kami di edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surat Pembaca

Pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada BALITBANGDA Papua Barat, yang telah menghadirkan Majalah Kasuari Inovasi. Semoga Majalah ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca, baik di Papua Barat sendiri, maupun pembaca di luar.

Kedua, saya tertarik dengan beberapa hasil penelitian yang dimunculkan di sini. Hanya saja, isinya masih terlihat ilmiah. Bagaimana jika hasil penelitian ilmiah tentang keanekaragaman hayati di Papua Barat ini dikemas dengan bahasa yang sederhana dan sedikit animasi gambar, sehingga masyarakat awam juga dapat mencerna informasinya dengan baik. Sedangkan untuk karya ilmiah, mungkin baiknya disertakan link menuju jurnal dimana karya ini dipublikasi.

Ketiga, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada tim Majalah Kasuari Inovasi dan BALITBANGDA Papua Barat. Walaupun baru seumur jagung, namun telah menghadirkan informasi yang bermutu untuk inovasi di Provinsi Pembangunan Berkelanjutan ini.

Salam,
Someone/Jalan Gunung Salju Amban -
Manokwari



Penerbit

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Pembina

Gubernur Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat
Sekretaris Daerah Papua Barat

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS

Penanggungjawab

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Drs. Elisa Lesnusa

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah
Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut

Pemimpin Redaksi

Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbitangan
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

Peliputan

Lince Baransano, S.Si
Alberth Yomo
Arissa F.T.M Muzendi, SP

Fotografer

Yohanis Octovianus, ST

Tim Data

Jhonal Thio, S.Pi
Rein Hallatu
Ferdinandus Hurulean, SP.
Christoffel Maweikere, S.Si., M.Si
Nita Yohana, S.Pi

Editor

Yance de Fretes, Ph.D
Dr. Keliopas Krey, S.Pd, M.Si.
Dr. Onasius P Matani, S.Hut., M.Sc.
Dr. Anthoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc.
Jimmy F. Wanma, S.Hut., M.Sc

Layout

Tim Econusa

Alamat Redaksi

Balitbangda: Jl. Brigjen (Purn) Abraham O.
Atururi, Gd Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2
dan 3, Arfai Manokwari.

Website:

<http://balitbangda.papuarprov.go.id>

Email : redaksi@kasuariinovasi.com

Kerjasama Balitbangda Provinsi Papua Barat
dengan Yayasan EcoNusa

ISSN-p: 2686-4827

DAFTAR ISI

PROFIL TOKOH

Drs. Nataniel
Dominggus
Mandacan, M.Si
—5



LAPORAN KHUSUS

Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi
Hijau (High Level Meeting Green
Investment) Provinsi Papua Dan
Papua Barat —8

Pembentukan Satgas Komoditas Lokal
Unggulan Non-Deforestasi Papua
Barat —11

Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
Untuk Membuat Dunia Lebih Baik —14

Kunjungan Gubernur Papua Barat ke
Oransbari Manokwari Selatan —21

Harmonisasi Perdasus Pembangunan
Berkelanjutan di Papua Barat —25

Provinsi Pembangunan
Berkelanjutan Untuk Membuat
Dunia Lebih Baik —22

OPINI

Konstruksi Dan Dekonstruksi
Konsep "Igya Ser Hanjop"
Masyarakat Arfak —27

SERBA-SERBI

Cerita dari Los Angeles —29

Suka Duka Kuliah Daring di Masa
Pandemi Covid-19 —33

Kearifan tradisional Papua
—31

GALERI —34

KEARIFAN LOKAL

KAMPUNG PARTISIPASI: Kampung
Kwok, Pegunungan Arfak —38

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tungau Acarina: Ektoparasit Ular Putih
(Micropechis ikaheka) —41

Pulau Gam, Raja Ampat: Potensi dan
Pesona Blue Water Mangrove untuk
Ekoturisme Hingga Hidupan Liar
dan Ancamannya —43

IPEK

Pemanfaatan Data Satelit
Dalam Perencanaan Wisata Hiu Paus
—47

MITRA PEMBANGUNAN

Pemetaan Partisipatif,
Kunci Keterlibatan Masyarakat dalam
Pembangunan di Tingkat Tapak —51

PANORAMA —54

PROMOSI

Aneka Produk Kopi —55



PROFIL OPD

Profil Biro Administrasi Pembangunan
—56

Foto cover:
Optimalisasi Pengelolaan Padi Sawah di Papua Barat



“Dalam bekerja, saya tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Saya tidak pernah mencari jabatan sama orang, bahkan saya tidak mau bekerja untuk mencari keuntungan. Saya berprinsip bahwa saya bekerja bukan untuk mencari uang, karena uang itu akan datang kalau saya bekerja. Jadi saya harus tekun bekerja dan tunjukkan sikap yang baik, maka uang dia akan datang sendiri untuk mencari orang yang bekerja”

Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si bersama keluarga.

DOK. PRIBADI

Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si adalah salah satu putra asli Manokwari, Papua Barat yang memiliki karir terbaik dalam Birokrat Pemerintahan. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Papua Barat. Nataniel D. Mandacan akrab dipanggil Nataniel, lahir di Manokwari pada 11 November 1962. Sejak 24 Oktober 1993 dirinya menjalani kehidupan berumah tangga bersama Ibu Ir. Sulastri dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Meinatri Cykitta Mandacan, Febriangga Putra Mandacan, dan Ify Kireyna Mandacan. Semua pencapaian dan posisi yang diperoleh saat ini merupakan hasil dari proses perjalanan kehidupan yang terus belajar, berjuang, berkorban dan bertanggung jawab. Nataniel layak menjadi panutan bagi masyarakat yang ada di Papua Barat, khususnya Manokwari.

Anak keempat dari 14 bersaudara ini merupakan putra dari salah satu tokoh dan pemimpin kharismatik Suku Besar Arfak, Bapak Barendz Mandacan (Almarhum) dan Ibu Emma Mandacan (Almarhumah). Dalam kehidupan keluarga besar ini, keber-

samaan, kerukunan dan saling mengasahi menjadi dasar yang diterapkan oleh orang tua. Hidup dalam didikan keluarga yang menerapkan kedisiplinan, kerja keras dan bertanggung jawab, membawanya mencapai kesuksesan hingga saat ini. Modal kepemimpinan telah melekat sejak dini dalam diri Nataniel, dimana selalu tampil memimpin dan memotivasi teman-teman seusia, bahkan yang lebih tua pun selalu mendengar arahan dan ajakan darinya. Cerita masa kecil yang tidak pernah dilupakan, saat bersama saudara-saudaranya yang suka bermain kartu hingga larut malam. Suatu ketika salah satu dari mereka kedapatan sedang bermain kartu, sehingga mendapat hukuman dari ayah mereka dengan mengikat kaki dan tangan, kemudian memberikan nasihat pada mereka semua. "Siapa yang merasa diri kuat dan tidak mau sekolah berarti dia harus berkebut. Tetapi siapa yang tidak kuat berkebut, harus sekolah. Jadi saya merasa bahwa saya tidak bisa bikin kebut jadi saya harus sekolah. Hal inilah yang membuat saya harus berusaha untuk belajar dengan tekun dan bersekolah hingga pada tingkat Perguruan Tinggi", Jelas Nataniel.

Riwayat pendidikan formal, Nataniel memulai pendidikan Sekolah Dasar pada Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Fanindi Manokwari tahun 1969 hingga tahun 1972 dan pindah sekolah ke SD Negeri Amban Manokwari hingga lulus pada tahun 1975. Pada tahun 1976 melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Manokwari dan selesai tahun 1979. Tahun 1980 melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 415 Manokwari hingga lulus pada tahun 1982. Nataniel kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Cendrawasih (UNCEN) Jayapura dan meraih gelar sarjana (Drs.) tahun 1987. Pada tahun 2002 menyelesaikan pendidikan tugas belajar pada Program Pasca Sarjana Strata Dua (S2) Magister Administrasi Publik Konsentrasi Studi Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta hingga lulus pada tahun 2004.

Sejak tahun 2014 Nataniel menjabat sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Papua Barat pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Barat Brigjen TNI Mar



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat saat diwawancarai oleh CNN Indonesia.

DOK. BALITBANGDA

(Purn) Abraham Octovianus Atururi (Almarhum). Selanjutnya pada tahun 2017 Nataniel mengambil sumpah janji jabatan sebagai SEKDA Provinsi Papua Barat untuk mendukung Gubernur Papua Barat (Drs. Dominggus Mandacan) dan Wakil Gubernur Papua Barat (Mohamad Lakotani, SH, M.Si) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, SEKDA bertanggung jawab kepada Gubernur Papua Barat serta mendukung sistem Pemerintahan dalam mengimplementasikan Visi & Misi Kepemimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Nataniel memiliki motto hidup: Bekerja jujur, melayani dengan kasih, meraih hidup bahagia dan sejahtera. Prinsip hidup inilah yang menjadi dasar baginya dalam bekerja dan berprofesi di dunia birokrasi. Hal ini terbukti dalam kesehariannya yang bekerja dengan ulet, tangguh, selalu mau belajar dari hal-hal kecil, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mengekspresikan kebahagiaan, kesejahteraan yang dibarengi dengan mentalitas kedisiplinan. "Dalam bekerja, saya tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Saya tidak pernah mencari jabatan sama orang, bahkan saya tidak

mau bekerja untuk mencari keuntungan. Saya berprinsip bahwa saya bekerja bukan untuk mencari uang, karena uang itu akan datang kalau saya bekerja. Jadi saya harus tekun bekerja dan tunjukkan sikap yang baik, maka uang dia akan datang sendiri untuk mencari orang yang bekerja" jelasnya.

Nataniel selaku anak adat sangat antusias mendukung Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (atau dikenal juga dengan Provinsi Konservasi). Ia menyampaikan bahwa sepanjang manusia masih hidup, pasti pembangunan akan terus berlangsung berbarengan dengan kebutuhan hidup manusia. Belajar dari pengalaman di daerah lain, maka Rencana Tata Ruang yang akan direvisi dapat mengkomodir upaya menjaga kelestarian alam lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sehingga pelaksanaan pembangunan terus berjalan tanpa merusak potensi sumber daya alam (SDA) yang ada. "Saya berharap kepada kita semua, baik di Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat terutama LSM lokal dan masyarakat agar terus berkolaborasi menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang kita miliki, mengikuti pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan ekologi di Tanah Papua, khususnya Papua Barat. Harus selalu ada kesadaran bahwa kita masing-masing memiliki peran dalam menentukan

sesuatu untuk masa depan alam kita. Apa yang sekarang kita nikmati adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang atau orang-orang tua kita. Begitu juga kita harus bertanggung jawab mewariskan pola kehidupan yang baik dan lingkungan yang lestari kepada generasi yang akan datang. Nataniel menjelaskan prinsipnya, bahwa apa yang saya nikmati saat ini adalah milik (pinjaman) mereka. Jadi saya tidak makan semua sampai habis (serakah), terutama memanfaatkan potensi SDA, tetapi ada yang kita simpan supaya mereka juga nikmati SDA yang ada seperti saat ini" jelasnya.

Selain itu, SEKDA Provinsi Papua Barat ini pernah mendampingi Gubernur Papua Barat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Raperdasus tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat pada saat pembukaan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018. Tidak hanya itu saja, pada beberapa forum Nataniel menyatakan bahwa penetapan Perdasus sangat penting, bahkan ia terus mendorong Pengesahan Peraturan Daerah Khusus untuk melindungi SDA, yang mana telah ada dalam kearifan lokal turun temurun sejak nenek moyang dulu sudah mengetahui bagian-bagian yang harus dilindungi dari gunung hingga laut, tetapi itu hanya tersirat saja dan perlu ada peraturan tertulis yang dapat diketahui oleh kita semua.

Selaku anak adat, ia mempunyai impian yang sangat besar terkait pembangunan berkelanjutan; "Saya bermimpi suatu ketika, hutan itu tidak ada kayu yang jatuh (pohon ditebang), kayu tidak dijual keluar, tetapi hutan akan tetap terjaga dan lestari serta menghasilkan uang. Masyarakat lokal (adat) akan menerima uang di tempat mereka, sudah sepatutnya kita menghargai masyarakat lokal (adat) yang telah menjaga keanekaragaman hayati yaitu flora dan fauna di hutan mereka. Saya bercita-cita untuk suatu ketika ekonomi dibangun dengan cara yang berbeda, potensi pariwisata serta fasilitas yang ditata secara baik. Jadi para wisatawan akan membayar langsung kepada masyarakat dan menikmati keindahan alam di hutan yang terjaga dengan baik." tambahnya. ●

Lince Baransano/Balitbangda)



Pada tanggal 15 Januari 2020, Rapat terbatas persiapan HLM di Hotel Haris Jakarta yang dihadiri perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Kantor Staf Presiden dan Pemda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA

Pertemuan Tingkat Tinggi Rencana Investasi Hijau (*High Level Meeting On Green Investment Plan*) Provinsi Papua Dan Papua Barat

Kota Sorong Papua Barat, diawal tahun 2020 yaitu tepatnya tanggal 27 Februari ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau (*High Level Meeting Green Investment for Papua and West Papua*) yang merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai satu-satunya Provinsi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia untuk terus mengawal butir-butir Deklarasi Manokwari, khususnya butir ke – 13 yaitu “Mengem-

bangkan kemitraan global, nasional dan local dan membentuk platform para pihak yang mendukung model investasi dan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua”.

Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah pusat/nasional, Pemerintah Provinsi Pa-

pua dan Papua Barat, para senior eksekutif swasta dalam dan luar negeri, Mitra Pembangunan dan lembaga sosial keagamaan. Pertemuan ini dalam rangka melihat berbagai potensi investasi hijau untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Namun disisi lain masih banyak keteringgalan pada bidang sosial dan ekonomi menjadi persoalan be-



Pertemuan antara Gubernur Papua Barat dengan Pimpinan UKCCU- Kedutaan Besar Inggris didampingi oleh Kepala Balitbangda Papua Barat dan CEO EcoNusa di Swissbel Hotel Sorong, 27 Februari 2020 (atas).

DOK. BALITBANGDA

Suasana Diskusi Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang duduk bersebelahan dengan Gubernur Papua Barat, di Swissbel Hotel Sorong, 27/02/2020 (bawah).

DOK. BALITBANGDA



Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan difasilitasi oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) bersama Balitbangda Provinsi Papua Barat sebagai Koordinator Forum Mitra Pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Tim Ekonomi Berkelanjutan Provinsi Papua Barat yang mengawal dan mempersiapkan pertemuan tersebut

Pertemuan yang dihadiri ratusan orang tersebut menjadi momentum penting bagi investasi pembangunan ekonomi hijau di Tanah Papua, hadir pada pertemuan itu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang secara tegas menyampaikan bahwa swasta harus membantu berinvestasi dalam pengembangan komoditas lokal unggulan non deforestasi seperti pala, kopi, kakao, rumput laut, dan ekowisata.

Tidak ada lagi deforestasi, tidak ada lagi minyak sawit, kami tidak hanya berbicara tentang investasi besar tetapi juga usaha kecil dan menengah kata Menko. Hadir juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Kepala Badan Investasi Bahliil Lahadalia; dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanosoedibjo, direktur jenderal dan staf khusus Presiden, aktif terlibat diskusi, negosiasi dengan para petinggi bisnis/swasta dari 45 perusahaan yang hadir.

Menko Maritim dan Investasi menyatakan bahwa investasi hijau sangat penting

sar di Tanah Papua. Tantangan yang besar ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi sehingga permintaan pembukaan lahan dan menimbulkan resiko deforestasi yang menimbulkan resiko. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah dan akan terus berusaha untuk mencari solusi inovatif yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi tetap mengurangi pembukaan lahan sambil mengikuti prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini bertujuan

untuk memfasilitasi dialog multipihak, khususnya antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan pihak perusahaan perdagangan komoditi untuk memperoleh kesepakatan bersama guna mendukung pengembangan komoditas potensial di Papua dan Papua Barat sebagai solusi inovatif untuk mewujudkan pembangunan Tanah Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini boleh terjadi akibat dari proses dialog yang dilaksanakan sejak tahun 2018 dan didukung oleh Kementerian

karena pembangunan berkelanjutan membutuhkan modal yang besar. Badan Perencanaan dan Pembangunan Indonesia (Bappenas) memperkirakan Indonesia akan membutuhkan sekitar US \$ 4,7 miliar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan 62% akan disediakan oleh pemerintah dan sisanya akan didukung dari sumber lain.

Selanjutnya Gubernur Papua Barat, telah berkomitmen untuk melindungi hutan dan telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua Barat pada agenda tersebut menyerahkan bisnis plan /booklet yang berisi informasi potensi komoditas prioritas Papua Barat. Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa hanya 33 persen dari 2,7 juta hektar lahan di luar kawasan hutan telah dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas berbasis lahan. Ini adalah potensi yang belum dimanfaatkan yang perlu diwujudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil mempertahankan pelestarian hutan dan lahan di Papua Barat

Klemen Tinal, Wakil Gubernur Papua mengatakan bahwa “ada 5 bidang di Provinsi Papua yang menarik untuk dilirik Investor yaitu sumberdaya manusia yang terampil, pembangunan infrastruktur dan logistik untuk meningkatkan profitabilitas bisnis, keamanan, serta menyelaraskan antara investasi dan pembangunan rendah karbon.

Sebelum Pertemuan Tingkat Tinggi ini berlangsung, Pemerintah Papua dan Papua Barat, Yayasan IDH telah mengembangkan Rencana Pertumbuhan Hijau (GGP) dan Cetak Biru Investasi Hijau (GIBP) untuk kedua provinsi. GIBP berisi, antara lain, informasi tentang berbagai komoditas yang dibudidayakan di Papua dan Papua Barat, memiliki potensi pasar yang baik, dan sesuai dengan budaya dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Pada bulan Juni 2019, kedua dokumen ini telah dibahas dalam forum konsultasi publik di Manokwari dan Jayapura yang melibatkan para pemimpin adat dan agama, kelompok perempuan, bisnis lokal, Organisasi Masyarakat Sipil dan kaum muda. ●

(Ferry Hurulean/Balitbangda)



Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang secara tegas menyampaikan bahwa swasta harus membantu berinvestasi dalam pengembangan komoditas lokal unggulan non deforestasi seperti pala, kopi, kakao, rumput laut, dan ekowisata.

DOKUMEN BALITBANGDA



Rapat persiapan HLM di Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, 19 Februari 2020. DOK. BALITBANGDA



Rapat Tim dalam rangka mempersiapkan pembentukan SATGAS Komoditas Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA

Pembentukan Satgas Komoditas Lokal Unggulan Non-Deforestasi Papua Barat

Dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan ekonomi dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang bertumpu pada pengembangan daerah yang lebih menghargai lingkungan, melindungi sumberdaya alam, dan pengembangan komoditas non deforestasi yang telah dikembangkan oleh masyarakat adat/OAP tanpa merusak hutan atau membuka hutan yang luas atau dikenal dengan ekonomi hijau (berbasis lahan).

Gubernur Papua Barat dalam acara pelepasan ekspor enam ton biji Kakao Ransiki Kualitas Premium dari Koperasi Eiber Suth Cokran ke pasar Eropa pada hari Kamis, 9 Januari 2020 di pelabuhan laut Manokwari, menyampaikan untuk segera mempercepat proses peningkatan komoditas un-

gulan dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) penanganan pengembangan komoditi perkebunan (kakao, kopi, pala, kelapa, rumput laut) dan ekowisata dimana satuan-satuan tugas yang dibentuk bertugas menyusun perencanaan dan pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua Barat yang meliputi budidaya komoditi, penanganan panen, penanganan pasca panen, proses pengolahan (industri) dan peningkatan nilai tambah, distribusi dan pemasaran produk unggulan sampai pengawasan dan pengendalian komoditas di tingkat provinsi dan kabupaten.

Tim Ekonomi Berkelanjutan Papua Barat yang terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perke-

bunan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, menginisiasi dan mempersiapkan serta menyusun satgas-satgas komoditas berdasarkan potensi unggulan daerah di Provinsi Papua Barat.

Asisten Administrasi Umum SETDA Papua Barat Reymond R. H. Yap, SE., M.TP bahwa segera ditindaklanjuti arahan Gubernur Papua Barat untuk membentuk satuan-satuan tugas (satgas) yang terdiri dari lintas sektor baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan dengan potensi seperti: Pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana, kopi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kakao/coklat di Kabupaten Manokwari Selatan, Rumput laut di Kabupaten Raja



Arahan Gubernur Papua Barat pada Pembentukan SATGAS Komoditas Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA

SK Gubernur akan segera dibuat agar Tim Satgas dapat mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota bersangkutan untuk segera membentuk satuan tugas di tingkat kabupaten sehingga dapat bersinergi dalam mempercepat pengembangan komoditi.

Ampat dan Teluk Wondama serta ekowisata di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kaimana.

Senada dengan pernyataan Asisten Administrasi Umum, Kabiro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Barat, Dr. Onasius P. Matani, S.Hut., M.Sc, kerjasama yang akan dilaksanakan merupakan terobosan dalam menunjang pembangunan daerah, keterlibatan swasta, mitra pembangunan dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip dan tata pemerintahan yang baik atau good governance.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat. Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si. sangat merespon baik pembentukan Satgas komoditas. Disampaikan bahwa ide kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengembangkan kemajuan teknologi, menumbuhkan

kesadaran berinovasi, mengembangkan keragaman budaya serta dapat meningkatkan kepedulian sosial, serta pengembangan ekowisata dan pertanian berkelanjutan dengan pengembangan komoditas lokal dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi mempercepat percepatan pembangunan melalui berbagai inovasi, seperti dengan mencari peluang pasar, dan kemudian melihat berbagai tahapan proses dari hulu sampai hilir baik produksi, rantai pasar, rantai nilai sampai dengan pengolahan pasca panen. Diharapkan akan ada peningkatan nilai tambah dari setiap komoditas dan semuanya telah disiapkan dalam sebuah booklet potensi komoditi unggulan prioritas Provinsi Papua Barat.

SK Gubernur akan segera dibuat untuk kemudian Tim Satgas akan mensosialisasikan dan berkoordinasi kepada kabupaten dan kota untuk segera membentuk satuan tugas di tingkat kabupaten. Kepala Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Ir. Jacob Fonataba, M.Si, menyampaikan akan segera menindaklanjuti untuk menyiapkan berbagai data dan potensi komoditi kakao, kopi, pala dan kelapa dalam berupa data produksi, luas lahan, jumlah petani serta program kegiatan yang dilaksanakan baik bersumber dari APBD maupun APBN untuk disinergikan dalam satu rencana strategis.

Kepala Dinas PERINDAG Provinsi Papua Barat, George Yarangga, A.Pi., MM sangat mendukung rencana Gubernur Papua Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Papua Barat 2019–2023, dengan konsep one village one product, sehingga akan menghidupkan Industri Kecil Menengah di Provinsi Papua Barat.

Gubernur memandang perlu untuk segera membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan di Provinsi Papua Barat, dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan SK SATGAS Komoditas, agar Satuan Tugas dapat melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan lembaga teknis pusat dan daerah bertanggung jawab sepenuhnya pada Gubernur Papua Barat. Satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Kakao, Satgas Kopi, Satgas Pala, Satgas Kelapa Dalam,



Kunjungan lapangan Tim SATGAS ke lokasi Perkebunan Kakao di areal Koperasi Eiber Suth Ransiki.

DOKUMEN BALITBANGDA



Satgas Rumput Laut dan Satgas Ekowisata, dan keanggotaannya terdiri dari kolaborasi beberapa OPD dan mitra pembangunan yang akan bekerja secara bersama-sama menyusun perencanaan dan pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua Barat yang meliputi budidaya komoditi, penanganan panen, penanganan pasca panen, proses pengolahan (industri), dan peningkatan nilai tambah, distribusi dan pemasaran produk unggulan tersebut sampai pengawasan dan pengendalian komoditas di tingkat pusat dan daerah serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha wisata. ●

(Ferry Hurulean/Balitbangda)

Kepala Balitbangda Papua Barat bersama Pemilik Pondok Kopi Matoa saat melihat demplot uji coba jenis kopi dataran tinggi (Kopi Arabika) ditanam di dataran rendah (125 m dpl) dan berhasil menghasilkan buah perdana.

DOKUMEN BALITBANGDA



Kopi Pegunungan Arfak ketika dipromosikan di Bali oleh Bentara Papua, Februari 2020.

ALBERTH YOMO/BENTARA



Provinsi Pembangunan Berkelanjutan Untuk Membuat Dunia Lebih Baik

Gubernur: “Tugas utama kita adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka”.

Gubernur Papua Barat, Drs. Domingus Mandacan, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan mengatakan bahwa pada 19 Oktober 2015, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/

Kota telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi.

“Gagasan ini lahir untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan

Talk Show Interaktif Pembangunan Berkelanjutan tahap pertama yang dilakukan di Jakarta, 27 November 2019.

DOK. BALITBANGDA

masyarakat Papua Barat,” kata Gubernur Papua Barat sebelum membuka kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, Kamis (23/01/2020).

Gagasan ini merupakan penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat pada Pasal 36 yang mengatakan bahwa pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan, serta Pasal 38 Ayat 2 bahwa usa-

ha-usaha perekonomian dan pemanfaatan sumber daya alam harus menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Telah banyak kemajuan yang kita capai dalam 4 tahun sejak gagasan ini dideklarasikan. Seperti Pelaksanaan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018, Deklarasi Manokwari 2018 dan Aspirasi Teminabuan 2019, penyusunan dan penetapan Perdasus Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan” jelasnya.

Komitmen pembangunan rendah karbon dan usulan penetapan kawasan konservasi baru, dalam rencana peta jalan (roadmap) menuju pembangunan berkelanjutan, banyak menghadapi tantangan, misalnya bagaimana menerjemahkan program-program pembangunan menjadi kegiatan operasional di lapangan. Terutama pada sektor-sektor penting seperti kehutanan, kelautan, pertanian, ketahanan pangan, revisi tata ruang dan lainnya.

“Sasaran akhir yaitu bagaimana membangun dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sekarang dan bisa menjaganya, agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Karena alam yang ada ini, bukan merupakan warisan orang tua kita tapi merupakan titipan anak cucu kita. Tanpa mereka yang bijaksana kita tidak bisa melihat hal-hal seperti yang kita lihat hari ini,” tandas Gubernur.

Pemerintah Papua Barat, lanjut Gubernur, sedang menyiapkan rencana strategis percepatan pelaksanaan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan melalui arahan sesuai mandat Perdasus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Dirinya berharap agar Deklarasi Manokwari dapat diadopsi ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJM Kementerian dan Lembaga dalam mendukung percepatan Pembangunan Provinsi Berkelanjutan di Papua Barat.

Terkait hal ini sudah beberapa kali dilakukan dialog ke pusat dan disampaikan secara terbuka lewat diskusi-diskusi, agar di pusat juga bisa mengakomodir apa yang sedang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka melindungi ling-



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan pada kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan tahap pertama, di Jakarta, 27 November 2019.

DOK. BALITBANGDA

kungan hidup di Papua Barat. Pemda Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda telah memulai dengan upaya koordinasi dari tingkat pusat untuk melaksanakan gagasan-gagasan ini. Namun tentu saja masih membutuhkan diskusi mendalam dan koordinasi

lebih lanjut untuk mendapatkan saran dan masukan dari Pemerintah Pusat dan juga dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait yang ada di daerah yang mengetahui tentang perkembangan lingkungan hidup di Papua Barat dapat menyiapkan langkah-langkah konkrit percepatan pelaksanaan Provinsi Berkelanjutan.

“Saya ingin menggaris bawahi bahwa apa yang kita lakukan saat ini di Papua Barat tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk membuat dunia ini lebih baik bagi anak cucu kita di masa depan. Dalam kitab suci yang kita yakini Tuhan telah memerintah-



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan menabuh tifa disaksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D Heatubun, S.Hut., M.Si dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat, Dr. Onasius Pieter Moze Matani, menandai dimulainya kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, 23 Januari 2020.

ALBERTH YOMO/BENTARA

kan kepada kita untuk menjaga, mengelola dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan pada akhir hidup masing-masing orang. Oleh karena itu pemerintah daerah mengharapkan dukungan semua pihak dalam menjaga alam kita," tegasnya.

Gubernur menutup dengan pernyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup sehat di planet yang sakit, untuk itu harus saling bekerjasama untuk membuat bumi ini lebih baik. "Tugas utama kita adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka pada masanya. Papua Barat akan menjadi inspirasi dan contoh bagi dunia dan itu dimulai dari kita hari ini," tandas Gubernur mengakhiri sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan.

Jangan Lagi Ada Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit di Papua Barat

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D Heatubun, S.Hut., M.Si., yang didampingi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat menyampaikan progress inisiatif Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.

"Sudah teridentifikasi mitra yang mem-

bantu Pemerintah mengawal 14 butir kesepakatan Deklarasi Manokwari termasuk juga LSM lokal dan OPD di Papua Barat. Dari 14 butir kesepakatan itu, ada butir tentang kegiatan revisi tata ruang, dimana hampir sebagian besar mitra mendukung kami," ucap Prof. Charlie. Sedangkan butir kesembilan dan kedua belas hanya satu atau dua mitra yang mendukung, lanjut Prof. Charlie, sehingga diharapkan kegiatan mitra perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih, dan sumberdaya bisa digunakan secara efektif dan efisien.

Menurut Prof. Charlie, untuk 2019 dukungan pembangunan dari mitra cukup besar, detailnya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat. Dari mitra juga teridentifikasi ada beberapa hal yang saat ini akan menjadi prioritas, terutama dalam penyelesaian dokumen revisi tata ruang yang harus bisa segera diselesaikan. "Menurut logika, jika RTRW diselesaikan, maka aktivitas pembangunan akan menjadi lebih terkendali, lebih tepat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan," tandasnya.

Dirinya berharap agar bencana di Wasior, Sentani, Jayapura bahkan terakhir dengan banjir di Jakarta bisa jadi pelajaran. "Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu (di Papua Barat). Kalau terjadi banjir, longsor, nanti pemimpin daerah akan saling menyalahkan antara kabupaten yang

satu dengan kabupaten yang lain. Ini menyangkut penataan ruang secara keseluruhan tidak bisa terpisah-pisahkan," jelasnya.

Kata Prof. Charlie, investasi hijau di Papua Barat juga menjadi prioritas. Karena dengan menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan, tentunya dengan membatasi ekstraksi sumber daya alam. Mau tidak mau peningkatan ekonomi di Papua Barat harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Tentunya peta jalan dan satu "grand design" untuk investasi hijau sudah disiapkan.

Prof. Charlie juga mempresentasikan puluhan aksi dan rencana tindak lanjut yang akan difokuskan pada 2020. Diantaranya dukungan KLHS terhadap RTRW dan RPJM Papua Barat, regulasi turunan dari Perdasus Pembangunan Berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas individu baik di pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada termasuk lembaga adat menjadi prioritas untuk segera dilakukan. Demikian juga dengan pengembangan komoditas unggulan daerah non deforestasi yang bisa membawa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat akan jadi perhatian bersama.

Termasuk juga merevisi izin-izin yang ada sehingga dari konsesi atau penggunaan lahan hutan yang tidak aktif lagi, itu bisa diserahkan kepada masyarakat adat dan dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Juga terkait transfer fiskal un-

tuk penguatan fiskal di Papua Barat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, akan menjadi prioritas ke depan.

“Tentunya sudah menjadi komitmen kita bahwa pengembangan komoditas kalau boleh jangan lagi ada pengembangan komoditas kelapa sawit. Tapi hendaknya komoditas-komoditas yang kita kategorikan komoditas non deforestasi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” tegasnya.

Konservasi Papua Barat Bukan Soal Ikannya, Tapi Untuk Masa Depan Anak-Anak Papua

Mark Erdmann, Peneliti dari Conservation International Indonesia dalam kesempatan itu mengatakan, Konservasi Papua Barat bukan soal ikannya, tapi untuk masa depan anak-anak Papua. Karena yang mau dibuat dengan Provinsi Konservasi, dengan Perdatus, dengan Deklarasi Manokwari adalah untuk menjamin masa depan anak-anak Papua.

Karena itu mengapa mereka banyak memberikan waktu dan investasi untuk merealisasikan satu Provinsi Konservasi/ Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, dengan selalu mengingat anak Papua. “Saya

meminjam satu dua kata dari Bapak Fredi Numberi dalam bukunya “Quo Vadis Papua”, yang dalam Bahasa Latin maksudnya “Papua mau dibawa kemana?” Atau “Papua Barat mau dibawa kemana?” tanya Mark.

“Nah, kita bisa mempertanyakan, masyarakat Papua itu mau ke mana? Apakah mau jatuh dan tenggelam di dalam globalisasi ini? Atau justru mau menikmati alam kepunyaannya sebagaimana mestinya. Saya pikir itu yang membuat kenapa kita bergabung hari ini untuk membahas itu. Kalau membahas “Quo Vadis Papua”, saya mengharapkan kita akan menuju kepada “Provinsi Konservasi,” tandasnya.

Kenapa Papua Barat atau Tanah Papua seluruhnya layak dijadikan sebagai Provinsi Konservasi Pertama di dunia? Menurut Mark ada 3 hal: Pertama, masyarakat adat atau orang asli Papua yang sangat tergantung pada kekayaan alam Papua dan sangat rentan terhadap globalisasi, dimana hak orang Papua sering disingkirkan oleh perusahaan, dan itu sudah lama terjadi dan sekarang kita harus merubah itu.

Kedua, dari sisi alam daratannya, 90 per-

sen dari hutannya yang ada di sini masih cukup utuh, dan ini salah satu hutan tropis terbesar yang ada di dunia, dan itu penting sekali. Bakau dan gambut di sini juga sangat luas dan ini penting sebagai pengelola karbon. Mudah-mudahan transfer fiskal ekologis yang sedang digarap itu bisa terwujud. Keanekaragaman hayati di darat ini juga sangat khas, sangat endemik namun terancam, mulai dari burung cenderawasih sampai kanguru pohon.

Ketiga, dari sisi alam lautnya, jelas-jelas memperlihatkan keanekaragaman hayati di laut Papua Barat ini tertinggi di dunia, dengan ekosistem laut yang sangat terbaik. Tidak ada tempat lain di dunia yang seperti Papua Barat. Ini sangat-sangat penting bagi ketahanan pangan dan sumber ekonomi bagi masyarakat asli Papua di pesisir.

Bicara tentang nilai sumber daya alam Papua, menurut Mark, ada tiga hal yang paling penting sekali, pertama itu ketahanan pangan masyarakat lokal, itu sangat penting dan luar biasa. Dia juga punya nilai budaya dan sekarang nilai wisata bahari sangat luar biasa.

Kata Mark, untuk merealisasikan Provinsi Berkelanjutan dari sisi laut, Papua Barat pu-



Mark Erdmann, Peneliti dari Conservation International Indonesia saat mempresentasikan potensi kekayaan laut yang terdapat di wilayah Papua Barat, dalam kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, 23 Januari 2020. ALBERTH YOMO/BENTARA

nya 20 kawasan konservasi laut (perairan) yang luasnya sekitar 4,6 juta hektar dan itu sudah dibangun dalam 20 tahun terakhir. Patroli masyarakat dan aparat sudah berhasil menekan praktek pemboman ikan di hampir seluruh Kawasan Konservasi Perairan. Jadi bisa dibilang ada kesuksesan.

Jadi kalau ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, itu bisa sukses. Hasil perikanan juga sudah meningkat. Bisa dilihat biomassa ikan di perairan Raja Ampat sudah meningkat dalam 20 tahun terakhir. Jadi masyarakat lokal sudah bisa tangkap ikan lebih banyak daripada sebelumnya. “Jadi orang berpikir konservasi adalah untuk melarang, tapi sebenarnya tidak juga. Konservasi justru bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Jadi bicara soal Provinsi Konservasi, kata Mark, itu untuk masyarakat lokal di Papua Barat, bukan untuk orang yang datang dari jauh. Dari perspektif pariwisata, konservasi sangat membantu. Jika sebelumnya Raja Ampat, sekarang sudah berkembang ke Teluk Cenderawasih, Kaimana dan beberapa tempat yang menarik para penyelam untuk menikmati, baik Internasional maupun Indonesia.

Kalau di Tahun 2001 baru ada 1 resort milik Max Amer dan 1 liveaboard yang datang, ada 300 tamu, maka pada 2018 ada 12 resort, 59 liveaboard, 130 homestay dan hampir 30 ribu tamu dari 95 negara yang datang. “Kita belum hitung nilai ekonominya secara keseluruhan, tapi kalau lihat dari karcis jasa lingkungan yang dibeli tamu, itu ada sekitar 2 juta dollar pada tahun 2018, dan tahun 2019 lebih tinggi lagi.

Prinsip dari Provinsi Konservasi adalah untuk mengakui dan memastikan hak masyarakat adat Papua untuk mengelola, menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam Papua yang kaya demi masa depan anak cucu secara berkelanjutan sesuai dengan budaya lokal.

“Saya berpikir, kita harus mengerti dan mengakui bahwa ini satu konsep dan regulasi yang sangat maju, kalau kita bandingkan dengan tempat lainnya di dunia. Papua Barat bisa bangga dengan keberadaan Perdasus ini, dan saya harap itu bisa diselesaikan dengan cepat,” ucapnya.



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan pada kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Papua Barat, di Manokwari 23 Januari 2020. ALBERTH YOMO/BENTARA

New Zealand, kata Mark, itu negara yang tidak semaju seperti yang ada di Papua Barat, tapi cukup maju dalam hal regulasi. Mereka punya begitu banyak regulasi untuk menjamin hak masyarakat asli, yaitu orang Maori.

“Di tahun terakhir ada satu peraturan atau produk hukum yang keluar yang menurut saya sangat menarik yaitu berdasarkan kepercayaan orang Maori, bahwa sungai-sungai dan gunung justru punya hak yang sama seperti manusianya. Dia (gunung dan sungai) sakral dan dia penting sekali. Dalam regulasinya itu masuk, jadi kalau ada yang merusak sungai dan gunung, akan digugat.

Nah konsep ini sangat menarik dan sudah diterapkan di New Zealand. Ini mungkin yang bisa dipikirkan. Sekarang kita fokus pada Perdasus yang sudah hampir selesai, semoga kita sukses merealisasikan impian yang besar ini,” tandasnya.

MRP Papua Barat Menolak Penanaman Kelapa Sawit

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren pada kesempatan itu menegaskan, pihak MRP Papua Barat sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan dan langkah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.



Sebagaimana motto MRP Papua Barat; “Jaga Tanah Jaga Manusia”, maka MRP Papua Barat telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Konservasi, jadi MRP Papua Barat telah meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan pemberian ijin-ijin berbasis lahan yang masuk ke Papua Barat.

“MRP Papua Barat menolak dengan tegas penanaman kelapa sawit. Kami sudah sampaikan, kami tidak minta apa-apa dari itu semua, karena yang ada hanyalah menghancurkan hutan kami. Persoalan yang selama ini terjadi juga tidak pernah diselesaikan oleh Pemerintah Pusat,” tegas Maxi. Namun sayangnya, kata Maxi, keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Barat ini untuk mendorong Provinsi Konservasi belum diikuti oleh Pemerintah Kabupaten. Ia mencontohkan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang memberikan izin

untuk penanaman kelapa sawit kepada investor. “Ini sangat menyakitkan, kami merasa tidak dihargai. Karena dalam Undang-Undang Otsus Nomor 21 diamanatkan bahwa setiap pihak ketiga atau investor yang masuk ke wilayah Papua Barat harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua Barat, tapi itu tidak dilakukan. Contoh lainnya adalah Pabrik Semen di Maruni, juga terjadi seperti itu. Semua melangkahi MRP Papua Barat,” tandasnya.

Maxi juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk serius soal pemetaan wilayah adat. Karena sampai saat ini pemetaan wilayah adat di Provinsi Papua Barat belum selesai. Sudah ada enam kabupaten yang telah dilakukan pemetaan wilayah adat. Jadi diharapkan Pemerintah Papua Barat bisa bantu dalam hal penganggaran untuk melanjutkan pemetaan wilayah adat.

Hanya saja, Maxi melihat masih terjadi tumpang tindih kegiatan antar OPD, da-

lam hal pemetaan. “Kalau bisa kita gabung jadi satu saja. Tidak bisa MRP buat sendiri, DPR buat sendiri terus tambah lagi Bappeda buat sendiri. Karena akan terjadi pemborosan biaya. Kalau bisa kita bentuk satu tim bersama untuk kerjakan pemetaan adat ini,” harapnya. Sampai sekarang, kata Maxi, masyarakat belum tahu batas-batas adat antara marga A dan marga B dan seterusnya, akhirnya konflik terus terjadi. Terjadi pemalangan-pemalangan di beberapa tempat. Contoh di jalan Trans Manokwari – Sorong dan Manokwari – Bintuni. Karena masyarakat merasa dilecehkan. “Jika tidak ingin terjadi pemalangan terus menerus, Pemerintah harus menghargai wilayah adat masyarakat,” tutup Maxi Ahoren.

Tanpa Sawit dan Tambang Orang Papua Tetap Bisa Hidup

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat, Dr. Onasius Pieter Moze Matani berharap semua pihak memahami dengan baik bahwa keseriusan Pemerintah Papua Barat dalam mendorong Perdasus Provinsi Konservasi atau Provinsi Berkelanjutan adalah bagian dari upaya mengatasi apa yang menjadi persoalan dunia saat ini, yakni krisis lingkungan hidup. “Kita seharusnya bangga, Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi pertama di dunia. Dalam perspektif daerah, kita harus sadari sepenuhnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Mark bahwa orang Papua harus kita selamatkan,” tegasnya.

Onasius juga mengingatkan jika kelapa sawit dan tambang tidak diterima di Papua, orang Papua masih tetap hidup. “Dari dulu orang Papua tidak mengenal itu kelapa sawit, tambang, dan lain-lain. Kita jangan ingat hari ini saja, kita punya anak-anak nanti hidupnya bagaimana? Sumber daya alam ini adalah titipan untuk anak cucu, bukan warisan,” tandasnya. Onasius juga menyarankan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah dan tata kelola penganggaran, yang harusnya tertuju pada satu tujuan bersama untuk mewujudkan Provinsi Konservasi atau Provinsi Berkelanjutan di Papua Barat.

“Saya orang yang tidak sepaham, ketika Raja Ampat itu jadi sebuah kabupaten. Mari kita pikirkan model pemerintahan apa yang cocok untuk Raja Ampat, supaya kita bisa menjaga sumber daya alam di sana.

Kalau dengan model kabupaten, pasti butuh pembangunan, dan itu cepat atau lambat pasti rusak. Sebaiknya Raja Ampat itu diurus oleh satu lembaga otorita atau apapun namanya, supaya dia bisa tetap terjaga,” ujarnya.

Hal lainnya, kata Onasius, adalah soal proses pemilihan kepala daerah. Ia berharap ada satu kebijakan khusus yang mengatur soal syarat calon kepala daerah, guna mewujudkan dukungan pemerintah kabupaten bagi tujuan Provinsi Konservasi atau Provinsi Berkelanjutan. Kalau ini tidak segera diatur, ditambah lagi jika pemimpinnya tidak punya visi misi lingkungan, maka pasti mengancam keberadaan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

Kita Punya Gas, tapi Kepala Dinas Pertambangan Masih Pikul Tabung Gas

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat, Abdul Latief Suaeri menambahkan soal kedaulatan lingkungan. Ada tiga pilar besar dalam kedaulatan lingkungan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi yang seharusnya termuat dalam Perdasus kita.

“Saya baca Perdasus bagi hasil Migas, dari 21 pasal, tidak ada satupun yang bicara soal hak kedaulatan lingkungan. Padahal itu diambil dari alam dan dikembalikan lagi dalam bentuk kompensasi uang kepada provinsi maupun kabupaten. Hanya bicara tentang pembagian, mudah-mudahan ini catatan bagi kita, mungkin bisa lewat peraturan Gubernur, bahwa harus ada hak lingkungan yang harus dikembalikan,” jelasnya.

Abdul Latief memberi contoh kasus di Bintuni. Di sana ada gas, tapi air bersih juga susah di sana. Seharusnya diamankan sumber-sumber airnya, sehingga orang Bintuni bisa menikmati air bersih.

“Kita punya gas, tapi Kepala Dinas Pertambangan masih pikul tabung gas. Seharusnya orang di Papua Barat buka keran di dapur, gas keluar. Itu baru hebat. Itu baru bicara kedaulatan lingkungan. Kedepannya kita harus bicarakan hal ini. Kita harus menikmati gas, baru kita jual ke China, Saudi Arabia, karena kita yang punya sumber daya alam,” tandasnya. Ia juga menyarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip

Good Environmental Government, sehingga Perdasus Pembangunan Berkelanjutan ini bisa diterapkan di semua tingkatan.

Abdul Latief menyarankan tiga hal untuk dilihat bersama, Pertama soal perencanaan. Banyak hal yang harus dibicarakan dalam review rencana tata ruang itu, khususnya dalam kaitannya dengan Provinsi Berkelanjutan. Sehingga semua kabupaten berpedoman pada tata ruang yang sama. “Jangan sampai provinsi bicara lain, kabupaten bikin lain lagi. Program-program OPD di tingkat kabupaten, juga diarahkan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mendesain skenario pembangunan berwawasan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Kedua, soal kelembagaan. Harus ada satu lembaga yang menjadi koordinatornya, sehingga tidak terjadi tabrakan dan tumpang tindih kegiatan, dari hulu sampai hilir, dari hutan sampai pantai itu satu cerita. Ketika ada masalah tidak saling melempar.

Ketiga soal pembiayaan, ini juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kecil atau sebaliknya,” tutup Abdul Latief.

Perdasus Masyarakat Adat dan Pembangunan Berkelanjutan Harus Berjalan Seimbang

Perwakilan Koalisi Ruang Hidup Papua Barat, George Dedaida mengatakan bahwa Koalisi LSM Papua Barat berharap Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat adat pemilik tempat.

“Makanya kami dorong Perdasus masyarakat adat. Kami berharap kedua Perdasus ini berjalan seimbang dalam pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Mengenai keinginan Gubernur Papua Barat untuk mempertahankan 70 persen kawasan konservasi, George juga minta untuk diseriusi bersama. Harus duduk sama-sama untuk menentukan kawasan mana saja yang bisa didorong untuk mencapai 70 persen itu.

Menurut George, ancaman terbesar bagi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan ini adalah dari pelepasan kawasan yang ti-



Foto lepas :

Gadis Papua menggunakan busana khas Papua, berjalan di hutan. JOPAN

dak tertata dengan baik. Karena itu, ia menyarankan untuk secepatnya membenahi tumpang tindih peraturan. Semua instansi harus bersinergi untuk melihat persoalan ini. George berharap ada satu instansi saja yang ditunjuk jadi koordinator dalam memantapkan konsep pembangunan berkelanjutan, supaya tidak tumpang tindih. Ia juga berharap, saran Ketua MRP Papua Barat terkait peta wilayah adat agar diperhatikan dan segera ditindaklanjuti, karena menurutnya itu hal yang penting. ●

(Alberth Yomo/Bentara)

Kunjungan Gubernur Papua Barat ke Oransbari Manokwari Selatan

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, didampingi ibu Yuliana Mandacan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan, Senin(11/5/2020).

Kunjungan kerja ini dalam rangka Penanaman ketahanan pangan kampung dengan penanaman pangan lokal, panen raya padi sawah dan pemberian bantuan bahan pokok lewat lembaga keagamaan.

Masyarakat Kelola Kebun Dengan Pangan Lokal

Kunjungan kerja Gubernur Papua Barat beserta rombongan, dimulai dari Kampung Muari, lokasi penanaman ketahanan pangan Kampung dengan penanaman pangan lokal. Saat tiba di lokasi, rombongan disambut Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, kemudian secara bersama melakukan penanaman beberapa jenis tanaman pangan lokal. Penanaman ini dalam rangka persediaan logistik pangan masyarakat kampung untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di Provinsi Papua Barat.

Sebelum melakukan penanaman dan penanaman, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya meminta masyarakat di Papua Barat untuk memanfaatkan lahannya dengan menanam berbagai jenis pangan lokal untuk mengantisipasi kondisi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Gubernur Papua Barat juga berharap, melalui program penanganan dan pen-



Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan Menanam Keladi pada saat kunjungan kerja beserta rombongan, di Kampung Muari, Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat.

ALBERTH YOMO/ BENTARA

cegahan Covid-19, Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa), masyarakat di kampung-kampung dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka kebun masing-masing dengan menanam singkong, keladi, petatas, pisang dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat, Lince Idorway, SH., MM, di tempat yang sama menjelaskan, bahwa melalui surat Gubernur Papua Barat tentang penegasan Percepatan Penyaluran Dana Desa dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui kegiatan peningka-

tan produksi bahan pangan yang ditujukan ke Kabupaten Distrik dan Kampung se-Provinsi Papua Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten telah menindaklanjuti dengan program dan kegiatan tersebut.

Total dana desa untuk Provinsi Papua Barat Rp. 1.516.915.258.000 yang terbagi di 12 Kabupaten, 207 Distrik, 1742 Kampung. Untuk Kabupaten Manokwari Selatan, total dana desa sebesar Rp. 60.747.683.000 untuk 54 kampung, dan untuk kampung muari sebesar kurang lebih Rp1.345.815.000.

Menindaklanjuti Surat Menteri Desa Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan melalui video Conference dengan Bapak Menteri Desa, PDTT terkait Bantuan Langsung Tunai



Desa (BLT-Desa) maka Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten telah memastikan dan mengawal penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).

Penanganan dan pencegahan Covid-19, penggunaan dana Desa untuk program penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan telah terbentuknya Tim Desa lawan Covid-19 (relawan-relawan di kampung). Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), selain menggunakan dana desa, juga ditunjang oleh dana otsus yang per kampung mendapat Rp 225 juta.

Diharapkan kolaborasi antara dana desa dan dana otsus pada program PKTD penggunaannya untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dapat meningkatkan produksi bahan pangan, khususnya pangan pokok dilaksanakan melalui kegiatan berta-

ni, berkebun, memelihara dan menangkap ikan, serta memelihara ternak sesuai dengan potensi lokal sumber daya yang tersedia di masing-masing Kampung.

Tujuannya adalah adanya persediaan logistik pangan masyarakat Kampung untuk mengantisipasi dampak Covid-19. Pencanaan ini kiranya dapat diikuti oleh Kampung-kampung di Provinsi Papua Barat.

Pemberian BLT-Desa dilakukan dengan musyawarah Desa. Di Provinsi Papua Barat baru 361 Kampung (20,27%) dari 1742 kampung yang melakukan musyawarah desa khusus, sehingga jumlah Kampung yang menyalurkan BLT-Desa baru 11 kampung dengan jumlah penerima sebanyak 908 kepala keluarga.

Untuk penerima BLT-Desa adalah kepala keluarga yang tidak terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial. Sinkronisasi data cukup rumit antara data PKH dan data non PKH.

Penyaluran BLT-Desa sebesar 600 ribu per kepala keluarga terhitung mulai bulan

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dan Ibu Yuliana Mandacan saat melakukan panen raya padi sawah di Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat. ALBERTH YOMO/BENTARA

April s/d Juni (3 bulan) dan saat ini baru 3 Kabupaten yang sudah menyalurkan BLT-Desa (Manokwari, Teluk Wondama, dan Sorong). Diharapkan pada minggu kedua dan ketiga bulan Mei BLT-Desa di Kampung-kampung dapat tersalurkan.

Optimalkan Pengelolaan Padi Sawah di Papua Barat

Setelah pencaangan penanaman pangan lokal, Gubernur dan rombongan melanjutkan perjalanan ke pelataran sawah di Oransbari, untuk melakukan panen raya padi sawah. Dalam sambutannya, Gubernur berharap sawah di Papua Barat juga harus terus dioptimalkan. Bukan saja padi di Oransbari Manokwari Selatan, tapi juga di Prafi Kabupaten Manokwari, Sorong dan Bintuni. Jika lahan di daerah-daerah ini dapat dioptimalkan, dirinya yakin akan sangat



Pembagian Bapok Oleh Gubernur Papua Barat di Gereja Getsemani Sidomulyo, Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat.

ALBERTH YOMO/BENTARA

membantu Pemerintah dalam menangani persoalan pangan akibat dampak Covid-19 di Provinsi Papua Barat.

“Kalau situasinya semakin buruk, kita tidak mungkin terus berharap kiriman beras dari luar. Karena itu, kita juga harus optimalkan lahan sawah yang ada, sehingga dapat memproduksi beras untuk kebutuhan di Papua Barat,” ujar Dominggus Mandacan.

Mengenai beras, Gubernur Papua Barat juga menambahkan, bahwa Provinsi Papua Barat, memiliki luas wilayah 99.671,63 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 981.822 jiwa.

“Hari ini kita sementara berada di hampan lahan sawah tanaman padi seluas kurang lebih 645 ha di Distrik Oransbari-Manokwari Selatan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, karena dalam situasi kita menghadapi pandemi Covid-19, yang mengancam kehidupan manusia, saat ini kita dapat melihat kemurahan Tuhan, yang memberikan padi yang telah menguning memasuki masa panen,” tandasnya.

Gubernur mengajak semua masyarakat berdoa, bersyukur dan bekerja, semo-

ga seluruh hasil panen padi, dapat menjadi beras sebagai sumber bahan pangan bagi masyarakat yang berada di Manokwari Selatan, dan cadangan bahan makanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

“Memperhatikan kebutuhan beras di wilayah Papua Barat yang terus meningkat, maka saya telah menetapkan kebijakan melalui dinas terkait di Provinsi Papua Barat, untuk membantu para petani mempersiapkan benih padi dan pupuk, yang akan dipergunakan untuk proses budidaya tanaman padi. Selain itu, saya juga telah memerintahkan untuk menyiapkan anggaran dalam optimalisasi lahan tidur, serta pembuatan pematang dan jalan usaha tani. Saya berharap akan terjadi penambahan luasan lahan sawah, dan akan meningkatkan produksi beras di wilayah Provinsi Papua Barat,” jelas Gubernur.

Sambung Gubernur, saat ini Papua Barat memiliki lahan padi kurang lebih 10.500 ha. Lahan-lahan ini tersebar di beberapa daerah sentra produksi padi, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Am-

pat, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kai-mana.

“Pada hari ini, saya akan mencanangkan panen padi seluas 645 ha, selanjutnya akan diproses melalui penggilingan, dan diperkirakan menghasilkan beras sebesar 1.200 ton. Ini sebagai bukti bahwa Papua Barat memiliki lahan yang mampu menghasilkan beras untuk bahan pangan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat. Mari kita jadikan Distrik Oransbari Manokwari Selatan sebagai lumbung pangan, menuju Papua Barat swasembada produksi beras,” tutup Gubernur Dominggus Mandacan.

Penyerahan Bantuan Bahan Pokok Melalui Lembaga Keagamaan

Setelah melakukan panen padi sawah, Gubernur Papua Barat dan rombongan memberikan bantuan secara simbolis bahan pokok melalui lembaga keagamaan dalam rangka jaring pengaman sosial penanganan dampak Covid-19 di Masjid dan Gereja di Distrik Oransbari.

Gubernur Papua Barat mengatakan penyerahan bantuan Bapok ini merupakan lanjutan dari program Jaring Pengaman Sosial khusus kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan JPS ini peneri-



Pembagian Bapok Oleh Gubernur Papua Barat di Masjid Baitul, Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat.

ALBERTH YOMO/BENTARA

manya diprioritaskan kepada janda, duda, yatim piatu dan lansia, dengan harapan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan selama masa pandemi Covid-19.

Gubernur juga mengatakan penyerahan bantuan ini didasarkan pada data umat/warga jemaat yang ada di lembaga-lembaga keagamaan di Provinsi Papua Barat, agar penyalurannya tepat sasaran. Dari 2.553 paket untuk Kabupaten Manokwari Selatan, baru diserahkan 50 paket yaitu 20 paket untuk jemaat di Masjid Baitul Kautsar dan 30 paket untuk jemaat di Gereja Getsemani Sidomulyo. Pemerintah Provinsi juga akan menyerahkan Rp 353 juta untuk program JPS.

Bupati Mansel Markus Waran menyampaikan terima kasih kepada Gubernur karena telah membantu mengurangi beban masyarakat selama masa Pandemi Covid-19. Bantuan Bapok khusus dari Pemda Mansel sedang dipersiapkan dan akan segera didistribusikan ke masyarakat penerima.

Gubernur juga telah menyerahkan bantuan sebanyak 3.396 paket Bapok kepada lembaga keagamaan di Pegunungan Arfak.

Selain itu, Gubernur juga memberikan bantuan 10 ton beras, dengan tiap distrik mendapat 100 sak.

Untuk penanganan Covid-19 melalui jaringan sosial dialokasikan melalui APBD 2020 sebesar Rp 12,5 Miliar. Ini sudah termasuk penyaluran bama ke Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tahap pertama. Untuk bantuan tahap berikutnya adalah 82.962 paket.

Gubernur berharap pemerintah kabupaten dapat menindaklanjuti dari penyaluran bama dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerima.

Secara umum tujuan penyaluran Bantuan Pokok (Bapok) jaring pengaman sosial Provinsi Papua Barat adalah untuk mengurangi beban ekonomi sosial rumah tangga dari masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan juga sebagai salah satu wujud intervensi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menggerakkan roda ekonomi regional melalui penyediaan dan pengangkutan bahan pokok yang melibatkan mitra pembangunan (Bulog Div. Se-Papua Barat dan PD. Irian Bakthi Wilayah Papua Barat).

Tersurat didalam SK Gubernur Papua Barat No. 500/90.a/4/2020 bahwa, kriteria penerima manfaat barang kebutuhan pokok jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Papua Barat adalah : Warga Negara Republik Indonesia; bukan merupakan aparatur negara baik sipil, TNI dan POLRI; bukan peserta PKH Kementerian Sosial RI; bukan peserta kartu Sembako Program Kementerian Sosial RI; bukan peserta kartu Pra Kerja; bukan penerima bantuan dana Desa/Kampung; kaum dhuafa, fakir miskin, dia-konia jemaat, anak terlantar, janda, duda, lansia dan para imam serta hamba Tuhan. Maksud Pembatasan calon penerima manfaat dalam butir-butir kriteria tersebut, agar seluruh bentuk bantuan pemerintah, baik yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhindar dari pengandaan/penumpukan beberapa tipe bantuan pada salah satu penerima manfaat atau dengan kata lain tercipta pemerataan penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka penanganan dampak Covid-19 di Papua Barat. ●

(Alberth Yomo/Bentara dan Ferry Hurulean/Balitbangda)

Penyelesaian atau pengesahan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan merupakan salah satu target utama ICBE dan Komitmen dalam Deklarasi Manokwari. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Perdasus ini sudah selesai dibahas oleh MRP Papua Barat Desember 2019 dan kemudian disahkan oleh DPR Papua Barat pada 20 Maret 2019. Perdasus ini kemudian dibahas dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengenai materi dan mendapatkan nomor registrasi. Dalam proses ini, Mendagri memberikan beberapa perhatian isi perdasus ini dan juga nomor registrasi, dengan harapan Perdasus sudah dapat diundangkan sesudah perbaikan atas konsideran. Tujuan pertemuan harmonisasi ini adalah untuk menjawab berbagai konsideran Depdagri sebelum Perdasus ini diundangkan. diselenggarakan Diskusi Terbatas Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat

Pertemuan Harmonisasi Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, melalui diselenggarakan Diskusi Terbatas Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Balitbangda dan Biro Hukum, Papua Barat di Mansinam Beach Resort Manokwari. Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan, MM dan dihadiri oleh 50 orang peserta yang mewakili OPD terkait seperti BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Pertambangan dan Energi. Pertemuan ini bertujuan untuk menjawab beberapa konsideran yang disampaikan oleh Kemendagri dan harmonisasi terakhir Perdasus ini sebelum di undangkan.

Beberapa hal penting dan strategis yang dibahas dan diatur dalam PERDASUS untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, antara lain:

- 1) Penegasan bahwa minimal 70% dari total area ekosistem hutan tropis dan ekosistem esensial lainnya dari area daratan harus dilestarikan, (Bagian Tiga (Tujuan) pasal 4 poin 15).
- 2) Dewan Regional untuk Perubahan Iklim



Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si dan Kepala Balitbangda Prof. Charlie bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Harmonisasi Perdasus Pembangunan Berkelanjutan, yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum Dr. Robert Hammar.

DOK. BALITBANGDA

Harmonisasi Perdasus Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat

dan Pembangunan Berkelanjutan yang akan mengawasi implementasi pembangunan berkelanjutan di Papua Barat akan dibentuk (Pasal 51, paragraf 4 dan pasal 79). Dewan Regional Perubahan Iklim juga akan mengkoordinasikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Provinsi (Forum CSR) guna mendukung efektivitas implementasi CSR di Papua Barat (Pasal 76).

3) Pembentukan Forum CSR akan bersifat tetap, bukan ad hoc, yang susunannya akan diambil dari OPD terkait, lembaga perwakilan masyarakat dan serta lembaga masyarakat sipil dan lsm;

4) Memastikan bahwa biaya Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan akan ditanggung oleh: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-

insi Papua Barat; dan b) sumber keuangan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

5) Transfer Fiskal Ekologis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Negara Donor kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bentuk insentif, akan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan persentase perlindungan hutan di setiap wilayah, sebagai penghargaan untuk perlindungan hutan (Pasal 81).

6) Pasal 17 tentang pemberian hak kepada masyarakat dan pemerintah untuk merubah kawasan konservasi atau hutan lindung yang telah ada, diubah dan disesuaikan menjadi memberikan akses dan manfaat agar sesuai dengan undang-undang

lainnya yang berlaku, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.

7) Proses harmonisasi juga memasukkan kemungkinan untuk masyarakat dan pemerintah daerah mengusulkan kawasan konservasi baru. Untuk memastikan pasal ini tidak bertentangan dengan undang-undangan lainnya, maka kawasan konservasi yang diusulkan ada kawasan konservasi daerah.

8) Hal yang menjadi pembahasan adalah rendahnya ancaman hukuman dan denda dalam Perdasus ini. Disepakati bahwa perlu menggunakan mekanisme atau peraturan lain yang lebih tinggi sehingga dapat memaksimalkan ancaman hukuman dan denda.

Adapun tanggapan atas masukan-masukan dan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri, seperti:

1. Reperdasus ini merupakan tindakan-

lut/derivasi Bab XIX Pasal 63 dan Pasal 84 Undang-undang No. 21 tahun 2001 jo Undang-undang No. 35 tahun 2008, yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI), maka disarankan judulnya menjadi PERDASI sesuai dengan derivasi/amanat Undang-undangan Otsus.

2. Semua pasal yang berhubungan “konservasi perairan dan perikanan” akan diganti dengan “merujuk pada Perda RZWP3K Papua Barat”, karena PERDA RZWP3K sudah berlaku di Papua Barat.

3. Pasal 59 disarankan untuk dihapus karena delegasi penyusunan perda mengenai sampah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Pembentukan Forum CSR juga dipertanyakan apakah akan permanen dan bagaimana pembiayaannya. Terhadap pertanyaan ini, telah ditegaskan bahwa Forum CSR akan dibentuk permanen, melalui SK

Gubernur. SK Gubernur akan berlaku untuk selama 5 tahun, dan sesudahnya akan dipilih kembali dengan SK baru. Biaya Forum CSR berasal dari anggota korporasi, jadi berkelanjutan. Forum CSR perlu dibentuk, mengingat belajar dari pengalaman Dana 1% Freeport dan Dana Sosial BP di Bintuni.

Beberapa Peraturan Gubernur diperlukan sebagai aturan turunan dari PERDASI ini, dan Kepala Biro Hukum telah menyampaikan akan melengkapi peraturan gubernur tersebut dalam tahun ini juga. Namun karena pandemi Covid-19, beberapa kegiatan yang direncanakan, seperti mempersiapkan dokumen akhir PERDASI sebelum diberlakukan/diundangkan, mengidentifikasi Peraturan Gubernur yang diperlukan serta menyusun draft Peraturan Gubernur, menjadi tertunda dan akan direncanakan kembali setelah Program WFH selesai. ●

(Henny Widjawati/CI)



Konstruksi Dan Dekonstruksi Konsep “Igya Ser Hanjop” Masyarakat Arfak

“Tak kenal maka tak sayang” adalah sebuah ungkapan yang secara umum sering digunakan dalam sebuah dialog komunikasi baik secara verbal dan nonverbal yang menunjukkan identitas atau entitas pada sebuah obyek benda atau pada diri seseorang. Sayangnya seseorang dapat terjebak pada pikiran sempit dan bias pada definisi dan makna dari ungkapan tersebut karena pemahaman seseorang sangat bergantung pada pengetahuan dan literasi yang dimilikinya. Disinformasi dan gab dapat terjadi karena ruang persepsi yang berbeda oleh masing-masing individu dengan latar belakang kepakaran dan keilmuan serta motivasi dibalikinya. Terutama dalam memahami sebuah konsep dari istilah yang digunakan serta bagaimana epistemologi (metode) dari pemikiran seorang kemudian didekonstruksikan kembali oleh para pihak lain dalam wujud komunikasi dan tulisan yang berbeda.

Dalam kamus Bahasa Indonesia versi online, kata “Konstruksi” dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Sementara “Dekonstruksi” adalah penataan ulang. Tulisan singkat ini akan membahas secara kontekstual “Igya Ser Hanjop” pada batasan konstruksi awal dan dekonstruksi kembali pada publikasi dari beberapa pustaka yang telah terbit. Harus diakui bersama bahwa sejak awal istilah “Igya Ser Hanjop” diperkenalkan dalam penelitian tim kolaboratif antara Yayasan Kehati, Pusat Studi Asia Pasifik-Universitas Gadjah Mada (PSAP-UGM), dan Yayasan Bina Lestari Bumi Cenderawasih (YBLBC) yang dikomandoi oleh Prof. P.M. Laksono melalui program pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman Hayati di Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak dengan fokus pada pengembangan pengelolaan bersama (*co-management*) kawasan hutan. Jika merujuk pada konstruksi sosial antara konsep “Igya Ser Hanjop” Laksono dkk, 2001 dengan publikasi konsep “Land Etics” Aldo Leopold, 1949 persamaannya keduanya adalah bagian dari dialektika sosiologi pengetahuan (Peter L. Berger dan

Thomas Luckmann, 1990). Perbedaan mendasarnya terletak pada proses eksternalisasi dan internalisasi, dimana konstruksi “Igya Ser Hanjop” secara etik dibangun oleh pihak di luar komunitas aslinya, sementara konsep “Land Etics” dikonstruksi secara etik oleh internal komunitas itu sendiri.

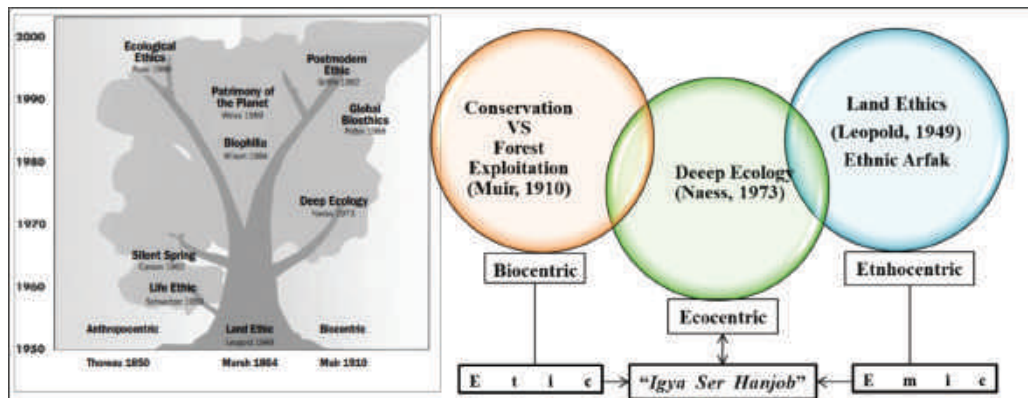
Konstruksi “Igya Ser Hanjop” oleh Laksono dkk, 2001 merupakan bagian dari etnosains dalam mengungkapkan pembagian wilayah hutan oleh masyarakat asli suku Arfak di Papua Barat. Etnosains sendiri adalah konstruksi dari pengetahuan lokal suatu masyarakat menjadi sebuah ilmu, dimana pertama kali diperkenalkan oleh Harold C. Conklin (1955) serta didukung oleh Charles O. Frake (1962), dalam sebuah simposium yang berjudul “Ecology and Anthropology” dengan paper berjudul “Cultural Ecology and Ethnography”. Sama dengan konstruksi “Igya Ser Hanjop”, persoalan pokok pandangan ekologi dan budaya paling utama terletak pada paradigma antroposentrismenya, dimana lingkungan hidup perlu dilestarikan karena kepentingan manusia sebagai pusatnya.

Suku besar Arfak sendiri terdiri 4 (empat) sub suku yakni Hatam, Moile, Soug dan Meyakh. Secara etimologi dalam bahasa Hatam, Igya berarti berdiri, Ser berarti menjaga, dan Hanjop berarti batas. Konseptual “Igya Ser Hanjop” diartikan secara luas sebagai semboyan “Mari kita menjaga hutan untuk kepentingan bersama” bagian dari interaksi dan adaptasi masyarakat lokal dengan lingkungan hutan khususnya di kawasan konservasi Cagar Alam (CA) Pegunungan Arfak. Batasan pada konsep “Igya Ser Hanjop” adalah sejumlah kesepakatan peraturan informal dan peringatan bagi masyarakat suku besar Arfak dalam pemanfaatan SDA yang bertujuan untuk menjaga dan tidak melewati batas-batas wilayah pemanfaatan zonasi hutan berdasarkan flora dan faunanya yang terbagi atas 4 (empat) zona yakni Bahamti (hutan primer dataran tinggi), Nimahamti (hutan lembab berlumut), Susti (hutan sekunder),

dan Susngoisi (bekas kebun) yang dipaparkan secara mendetail oleh Laksono dkk, 2001:180-183. Dalam pembahasan tulisan ini, konsep “Igya Ser Hanjop” tidak hanya sebatas pada paradigma antroposentris dalam konstruksi ilmu etnosains. Namun dalam konteks konservasi dan eksploitasi hutan pemikiran Jhon Muis, 1910 tentang paradigma biosentrisme juga sangat kental mempengaruhi pola pikir para praktisi konservasionis pada awal konstruksi “Igya Ser Hanjop”. Muara dari konsep ini sesungguhnya tersirat pandangan ekologi yang lebih mendalam (*deep ecology*, Neass, 1973) untuk tujuan agenda konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dengan diasosiasikan pada paradigma ekosentrisme menuntut suatu etika baru yang tidak hanya berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya secara kontekstual konsep Igya Ser Hanjop dikutip dan didekonstruksikan kembali oleh para peneliti, praktisi dan akademisi lainnya menjadi tumpukan pustaka berbentuk laporan, buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Harus diakui bahwa ada begitu banyak pustaka yang telah hadir sebelumnya, dan itu menjadi kendala utama serta keterbatasan oleh karena itu tulisan ini berusaha berfokus pada beberapa publikasi saja yang dianggap berkontribusi besar dalam mendekonstruksikan kembali pemikiran konsep Igya Ser Hanjop selama kurun waktu 2001-2019. Penggunaan pelacakan dalam google scholar sangat membantu penulis dalam melacak publikasi yang relevan dengan konteks Igya Ser Hanjop dimana berhasil menangkap 15 sumber publikasi, namun hanya 9 publikasi secara subjektif dianggap penulis sesuai dengan konteks konstruksi dan dekonstruksi yang dibahas dalam tulisan ini.

Pelacakan pustaka pertama untuk dekonstruksi konsep Igya Ser Hanjop dijumpai dalam tesis Yan Makabori, 2005 pada Pascasarjana IPB Bogor dengan ju-



dul Pergeseran Igya Ser Hanjop pada Masyarakat Lokal di Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak Kabupaten Manokwari. Kajian ini mengungkap signal awal memudarnya pemahaman Igya Ser Hanjop dalam perilaku masyarakat selama 20 tahun terakhir terutama aktivitas berburu binatang dan aktivitas pertanian tradisional telah memasuki ruang wilayah adat yang seharusnya dilindungi sekaligus menjadi inti pemahaman Igya Ser Hanjop itu sendiri. Sebaliknya dalam konsep pertanian, buku yang ditulis oleh Muladi, 2007 yang berjudul Pengadopsian Inovasi Pertanian Suku Pedalaman Arfak terbitan Scientific Repository IPB lebih mendekonstruksi kembali nilai-nilai budaya positif Igya Ser Hanjop yang turut andil memberi motivasi bertani kepada masyarakat Arfak dalam bekerja di kebun dengan pengetahuan rotasi kebun, dan pola pertanian tumpangsari dengan semangat tetap menjaga kelestarian alam. Pandangan yang sama dijumpai pada tulisan Muhammad Hujairin dkk, 2017 bahwa konsep Igya Ser Hanjop adalah wujud kearifan lokal turun-temurun yang menggambarkan bagaimana manusia dapat hidup secara harmonis dengan lingkungan hidupnya dan melahirkan *setting* budaya bertani sebagai konsep ladang berpindah, agroforestri dan polikultur yang mendukung diversifikasi pangan.

Dalam konteks kehutanan sendiri Igya Ser Hanjop didekonstruksikan lebih banyak berfokus pada penegasan agar dipertahankan dan diaplikasikan dalam pengelolaan hutan. Hasil publikasi B.W. Hastanti dan Irma Yeny, 2009 dalam Info Sosial Ekonomi mengungkap Strategi Pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Arfak Menurut Kearifan Lokal Masyarakat Arfak di Manokwari Papua Barat. Selanjutnya tulisan Skripsi

Marel Situmorang, 2013 dengan judul Strategi Adaptasi Masyarakat Arfak Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak pada Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dilanjutkan Disertasi Susan T. Salosa, 2014 pada Fakultas Kehutanan UGM dan telah dipublikasikan dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan dengan judul Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Hatam di Lingkungan Cagar Alam Pegunungan Arfak.

Dalam konteks hukum adat, dekonstruksi Igya Ser Hanjop disinggung juga dalam tulisan Roberth K. R. Hammar, 2018 dalam paper The Existence of Customary Rights of Customary Law Community and Its Regulation in the Era of Special Autonomy of Papua di Journal of Social Studies Education Research adalah kerangka penting legitimasi bagi perlindungan dan pengakuan hak-hak adat Komunitas Hukum Adat di Papua Barat. Selanjutnya publikasi tahun 2019 dapat dijumpai pada Agribusiness Journal oleh Therresse Nofianti, 2009 dengan judul Perubahan Sosial Komunitas Suku Arfak Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat yang mengungkapkan perubahan sosial yang memberikan dampak positif dan negatif pada kehidupan masyarakat pada masyarakat Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak akibat perubahan komposisi jumlah penduduk, kebijakan Otonomi Khusus Papua, masuknya inovasi baru, dan semakin mudahnya transportasi, program pemberdayaan, perubahan kelembagaan adat serta nilai dan norma. Selanjutnya Antoni Ungirwalu dkk, 2019 dalam Jurnal Igya Ser Hanjop terbitan perdana Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat dalam paper Konstruksi Etnotekno Konservasi Burung Pintar (*Amblyornis Inornata*) di

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak menegaskan kembali bahwa pengaruh internal penggunaan konsep “Igya Ser Hanjop” masih sangat kuat dalam tatanan masyarakat lokal dan secara eksternal juga mendapat dukungan dari peneliti, wisatawan, LSM dan pemerintah memberikan andil dan dampak positif sistem pelestarian satwa pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak.

Kita sadari bersama bahwa konteks konsep awal konstruksi dan dekonstruksinya akan terus berlangsung secara dinamis, dimana ruangnya akan melibatkan banyak pihak untuk saling berkolaborasi mendukung ataupun friksi perdebatan (ilmiah) yang tentunya akan memperkaya konsep itu sendiri. Konstruksi konsep awal “Igya Ser Hanjop” sesungguhnya berpusat pada wujud emik kearifan lokal masyarakat Arfak dalam menjaga tapal batas wilayah pemanfaatan tradisional yang terjadi secara alami. Proses kreasi sosialnya telah memasuki tahapan didekonstruksi baru oleh para pihak (eksternalisasi) dengan epistemologi berbasis etik keilmuan yang berbeda-beda dalam melihat fenomena ekologi dan budaya pada ruang, waktu dan tempat interaksi masyarakat Suku Arfak. Bagi para pihak baik peneliti, praktisi dan akademisi serta pemerintahan, catatan penting konstruksi dan dekonstruksikan konsep “Igya Ser Hanjop” baik menurut tatanan paradigma etnosentrisme, biosentrisme, atau ekosentrisme adalah bagian dari diskursus yang perlu dielaborasi secara adaptif khususnya dalam mendukung terwujudnya Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua. Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat sekaligus menambah wawasan bagi kita bersama. ●

(Antoni Ungirwalu/UNIPA)

Reymond Hendrik Yap untuk pertama kalinya mewakili Gubernur Papua Barat menghadiri perayaan natal bersama mahasiswa Papua yang ada di Amerika dan Canada. Himpunan mahasiswa ini mengadakan natal bersama sekaligus pergantian badan pengurus himpunan mahasiswa Papua di Amerika yang mereka adakan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat pada bulan Desember 2019. Himpunan mahasiswa ini mengundang Gubernur Papua Barat untuk menghadiri acara yang dimaksud di atas. Mewakili Gubernur, Reymond Hendrik Yap didampingi beberapa pejabat daerah seperti Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan serta Kepala Biro Spiritual.

Menurut Asisten III Setda Provinsi Papua Barat, perjalanan panjang ini merupakan pengalaman pertamanya. "Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dapat dipercayakan untuk mewakili Gubernur membawa rombongan Papua Barat dan menghadiri acara ini. Satu hal yang buat saya bangga adalah saat bertemu anak-anak kita dari Papua dan semua sangat fasih berbahasa Inggris. Hal ini membuat saya sangat terharu, anak-anak kita juga mampu bersaing di Amerika" tutur lelaki asal Biak ini.

Pada kesempatan itu, Reymond membawakan sambutan Gubernur Papua Barat dalam acara yang turut dihadiri oleh beberapa Menteri dan petinggi TNI.

Perjalanan ini dilaksanakan dalam rangka melihat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua. Kebanyakan mahasiswa/i yang bersekolah di luar negeri dibiayai oleh pemerintah daerah menggunakan dana otonomi khusus (otsus). Sehingga pemerintah juga perlu melakukan pemantauan salah satunya dengan menghadiri acara yang mereka selenggarakan.

"Saya harapkan Ketika mereka selesai menimba ilmu di tempat ini mereka dapat kembali dan membangun Tanah Papua. Tidak hanya itu mereka dapat berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan, tidak harus selalu menjadi PNS" tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan untuk dapat belajar kesana. Untuk itu ia berpesan agar mahasiswa/i Papua di sana dapat mengguna-



Asisten III Setda Papua Barat, Reymond Hendrik Yap beserta Pejabat daerah saat Menghadiri Perayaan Natal bersama Himpunan Mahasiswa Papua di Amerika. DOK. BALITBANGDA

Cerita dari Los Angeles Amerika Serikat

kan kesempatan ini sebaik mungkin, bukan saja untuk kembali membangun Tanah Papua, jika mereka berkesempatan untuk dapat bekerja dan mencari pengalaman di sana lebih membanggakan lagi.

Tak hanya menghadiri acara yang diadakan oleh mahasiswa Papua di Amerika, tetapi rombongan juga diundang oleh Richard Sneider untuk berkunjung ke kediamannya di Beverly Hills, LA. Dalam kesempatan ini, Asisten III Papua Barat ini banyak berdiskusi bersama lelaki lulusan Harvard University ini terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Menurut Richard, banyak sekali pihak yang mau membantu Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, mengingat dalam penganggaran negara banyak hal yang tidak bisa pemerintah lakukan dan disinilah peran mitra pembangunan.

Salah satu kunjungan yang menarik juga adalah kunjungan rombongan ke Hollywood Los Angeles. Tempat yang sangat ter-

kenal ini menjadi salah satu destinasi wisata saat rombongan Papua Barat berkunjung ke LA. "Kami butuh penyesuaian dengan cuaca dan jelas waktu yang sangat berbeda, namun saya dapat menyesuaikan waktu dengan cepat. Berbeda dengan rekan saya yang tidak dapat tidur sewaktu tiba padahal hari sudah malam" tambahnya saat diwawancara mengenai kesan tiba di Amerika. Bukan hanya itu saja, Asisten III Gubernur ini juga menambahkan bahwa makanan yang ada disana juga sangatlah berbeda. "Saya sangat bersyukur, mendapat kepercayaan dari Gubernur Papua Barat untuk mewakili beliau dalam perjalanan ini. Saya bermimpi suatu saat Papua Barat khususnya Manokwari bisa dapat berkembang seperti LA. Kita hanya perlu waktu dan perencanaan daerah yang baik." akhir pernyataan Reymond Hendrik Yap dalam wawancara ini.

Lalu bagaimana cerita Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Dr. Onasius P.M Matani, S.Hut., M.Si yang mendampingi Asisten III untuk pertama kali ke Los Angeles Amerika Serikat? Berikut penuturannya kepada reporter Majalah Inovasi Kasuari;



Suasana peserta dalam Acara Perayaan Natal bersama Himpunan Mahasiswa Papua di Amerika. DOK. BALITBANGDA

“Sebenarnya saya bisa sampai ke Los Angeles Amerika Serikat, itu adalah Muji-zat Tuhan,” kata Onasius. Karena saat panggilan mendadak untuk verifikasi data visa di kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, posisinya di Kokas Kaimana melakukan kunjungan dinas mendampingi tim ekspedisi Mangrove. Dengan keterbatasan transportasi darat dan udara di Kokas dan Kaimana, membuat dirinya sempat ragu untuk memenuhi deadline waktu pemanggilan dari kedutaan Amerika Serikat di Jakarta.

“Saya harus berada di kedutaan Amerika Serikat Tanggal 10 Desember. Sementara Tanggal 7 itu, saya masih berada di Hutan Mangrove Kokas, Kaimana. Saat menerima panggilan telepon untuk berada di Jakarta tanggal 10, saya ragu akan sampai di Jakarta tanggal 10, karena memikirkan masalah transportasi di Kaimana. Terbukti, saat berada di Kaimana jam 12 malam, saya dapat informasi hanya ada satu penerbangan, sementara tiket belum ada,” tandasnya.

Tapi dirinya beruntung, akhirnya bisa dapat satu seat penerbangan dari Kaimana ke Sorong dan Manokwari.

Tapi, tantangan lain datang. Saat hendak berangkat ke Jakarta tanggal 9 itu, tiket pesawat ludes. “Semuanya dalam kondisi tergesa-gesa. Dari Manokwari ke Jakarta

lebih pusing lagi, karena tidak ada seat, akhirnya saya minta bantu orang,” ujarnya.

Dirinya memutuskan untuk langsung ke Bandara Rendani, mencari orang yang baik hati agar bisa mendapatkan tiket. Dengan bantuan beberapa teman di Bandara Rendani, akhirnya Onasius berhasil mendapatkan satu tiket ke Jakarta, dan Tanggal 9 itu juga sudah berada di Jakarta untuk persiapan memenuhi panggilan kedutaan Amerika Serikat pada Tanggal 10 Desember sesuai rencana.

Singkat cerita, setelah melalui proses verifikasi di kedutaan Amerika Serikat, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Papua Barat, bersama beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada 18 Desember 2019 pukul 12.50 WIB meninggalkan Tanah Air menggunakan Eva Air menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Menggunakan Eva Air juga adalah pengalaman pertama, karena berbeda dengan maskapai domestik yang biasa digunakan. Memang sangat membosankan, karena lamanya penerbangan. Terbang sekitar lima jam baru tiba di Taipei, Taiwan. Selanjutnya di pesawat selama 16 jam dari Taipei ke Los Angeles, dan baru tiba jam tujuh malam waktu Los Angeles, Amerika Serikat.

Ketika mengikuti kegiatan Musyawarah

Mahasiswa Papua se-Amerika, dirinya merasa terharu dan bangga melihat dan mendengar kisah para mahasiswa Papua.

“Saya melihat perubahan dan penampilan anak-anak Papua di sana sangat luar biasa. Mereka tampak terdidik. Ada yang kuliah sambil bekerja dan gajinya yang lumayan. Ini patut ditiru. Saya ingat dan setuju dengan kata Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Mahendra Siregar; Bagus-nya anak-anak Papua jadi anak-anak global, tidak menjadikan PNS sebagai tujuan utama,” tandas Alumni S2 Lingkungan UGM Yogyakarta ini.

Onasius berharap ada sistem yang bisa dibangun bersama untuk merubah cara pandang anak-anak Papua. Anak-anak Papua harus fokus untuk cari ilmu sampai ke Amerika, karena sekolah-sekolah terbaik di dunia ada di sana. Harus bekerja bersama untuk mendorong anak-anak Papua sekolah di sana.

“Bukan hanya Pemerintah, tapi juga swasta dan LSM. Kita harus bisa kolaborasi, Pemerintah perannya apa, LSM perannya apa?, swasta perannya apa?. Bagaimana dikolaborasi untuk bicarakan pendidikan anak-anak Papua ke Amerika Serikat,” ujar Alumni S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda ini.

Usai kegiatan bersama perhimpunan mahasiswa Papua di Amerika, dan bertemu Richard Sneider di Beverly Hills, LA, Onasius bersama sejumlah pejabat Pemerintah Papua Barat berkesempatan mengunjungi pusat-pusat wisata terkenal di Los Angeles, Hollywood, yang merupakan simbol bisnis hiburan terbesar di dunia. Di tempat ini bisa mereka menikmati berbagai bangunan terkenal seperti TCL Chinese Theatre dan Walk of Fame yang bertabur bintang. Atraksi utamanya termasuk Paramount Pictures, tempat musik bersejarah seperti Hollywood Bowl, dan Dolby Theatre, tempat diselenggarakannya penghargaan Oscar.

“Tapi sayangnya, saya tidak sempat ke Pantai Malibu, karena pengaruh Jet lag. Siang bolong di Los Angeles tapi saya masih terbawa dengan waktu Papua, jadi saya masih tertidur, saat diajak ke Pantai Malibu. Ya, memang adaptasi waktu ini masih jadi masalah buat saya,” kata Onasius. ●

(Novi dan Alberth Yomo/Bentara)

Kearifan Tradisional Papua Mendukung Pengembangan Kampung Iklim



Program Ketahanan Pangan di Kampung Iklim Edor, Kabupaten Kaimana-Provinsi Papua Barat.

M. FARID/ECONUSA

Melalui pengembangan skenario ilmiah, Perjanjian Paris sudah mengingatkan peningkatan suhu bumi hingga 2 derajat Celsius akan mengancam kehidupan di bumi termasuk di Tanah Papua.

Perubahan iklim dihubungkan dengan kemungkinan terburuk berubahnya sebaran tumbuhan di Tanah Papua yang dapat mengancam budaya lokal. Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat di Papua tentang jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk konstruksi, budaya, makanan dan obat-obatan akan berubah. Perubahan iklim tidak saja mengancam dari sisi fisik, kerentanan dan ketahanan sosial dan keanekaragaman hayati tapi juga pengetahuan dan budaya akan ikut hilang. Kalau skenario terburuk ini benar-benar terjadi dan kita tidak dapat kita antisipasi dengan baik, maka banyak jenis tumbuhan tertentu akan hilang, termasuk pengetahuan sekitar 300 suku dan komunitas di Tanah Papua.

Demikian penyampaian Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Charlie D Heatubun, pada acara “Diskusi online Membangun Kampung Iklim di Tanah Papua” yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2020. Diskusi ini dilaksanakan melalui kerjasama Direktorat Pengendalian

Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Yayasan EcoNusa, yang diikuti 200 orang peserta.

Kepala Balitbangda Papua Barat, menyambut baik gerakan membangun kampung iklim di Tanah Papua dan meminta perhatian semua pihak untuk mulai memikirkan program-program adaptasi dan mitigasi di tingkat kampung. Kepala Balitbangda Papua Barat, menjelaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat Papua dapat membantu pelaksanaan program pengembangan kampung iklim termasuk peningkatan ketahanan pangan terkait dengan pandemik Covid-19. Namun butuh data dan informasi ilmiah untuk membangun model-model praktek pengelolaan yang dapat diverifikasi,” tambahnya. Hal ini akan memudahkan OPD terkait dalam mendukung program pengembangan kampung iklim.

Manajer Program Yayasan Intsia Papua, Yoseph Watopa menyampaikan bahwa praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam pada sembilan kampung di Mamberamo, Provinsi Papua. Ia mengatakan banyak praktek-praktek kearifan tradisional yang sudah berlangsung di Kampung Kwerba, Marinavalen, Mrumere misalnya, ma-

sarakat menjaga sumber-sumber mata air dengan tidak menebang pohon di sekitar mata air, sedangkan di Kampung Kwerba dan Gesa Baru membangun bak penampungan di sekitar mata air, sementara kegiatan pengendalian banjir dilakukan di Kampung Papesena dan Dabra dengan membangun rumah panggung, atau rumah yang lebih tinggi, dengan menggunakan jenis kayu yang tahan air. Program peningkatan ketahanan pangan juga dilakukan di Mamberamo dengan membuat kebun campuran (kebun pinang, kakao, singkong dan pisang). Masyarakat juga menggunakan petunjuk alam dengan indikasi munculnya banyak kupu-kupu air dan nyamuk untuk menentukan musim tanam,” jelas Yoseph.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, MSc, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-KLHK mengatakan sampai saat ini jumlah kampung iklim di Indonesia adalah 2.146 lokasi setingkat desa/ kelurahan atau dusun/RW. Di Tanah Papua sampai dengan Tahun 2019 baru terdapat 20 lokasi. Kampung iklim dapat mendukung ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi terhadap kejadian cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Terisolasinya kampung-kampung di Tanah Papua dengan budaya ko-

munal masyarakat adat menjadi peluang untuk mengembangkan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui program kampung iklim (ProKlim) diharapkan upaya untuk meningkatkan daya tahan kampung akan menjadi lebih kuat dengan membangun program kampung iklim sesuai dengan budaya lokal di Tanah Papua. Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Dirjen PPI KLHK No P1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Maluku, Papua dan Papua

Barat, Prianto, S.Hut, M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung dampingan pemerintah daerah dan LSM lokal serta inisiatif program lainnya. Balai juga telah mensosialisasikan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung iklim sesuai dengan kebiasaan lokal. Program adaptasi dan mitigasi yang sudah melekat di masyarakat Papua seperti kegiatan pengendalian kekeringan, banjir, peningkatan ketahanan pangan, dan pengendalian penyakit terkait iklim.

la juga menekankan untuk masuk dalam program kampung iklim faktor kelembagaan juga perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas

masyarakat, keterlibatan pihak eksternal, mempertegas manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana iklim.

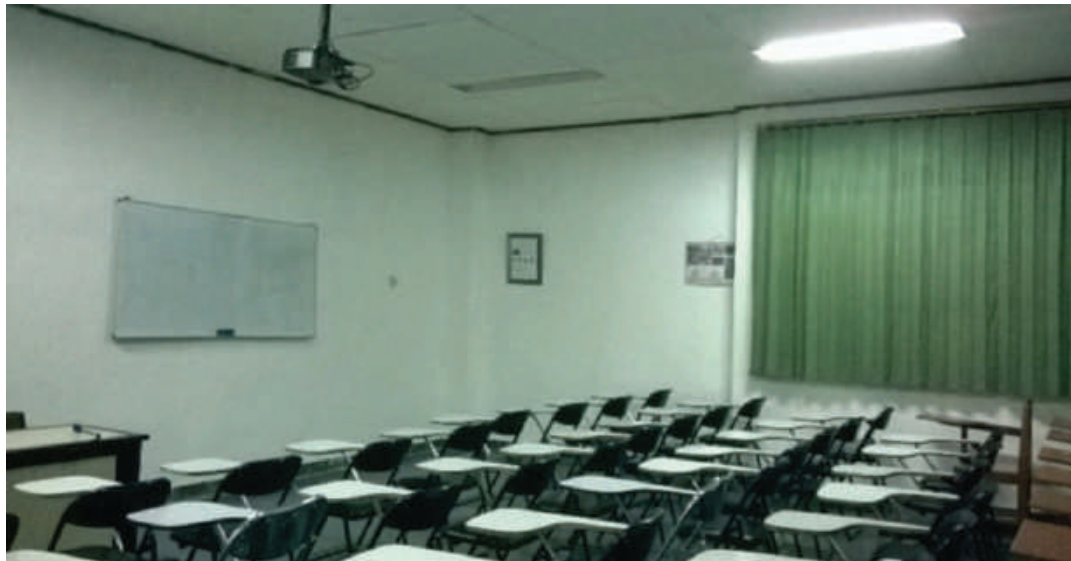
CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar mengatakan program kampung iklim sejalan dengan apa yang diperjuangkannya pada masa mendatang yaitu memandirikan masyarakat Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam. Setiap tahun EcoNusa bekerjasama dengan pemerintah dan LSM terkait mengadakan School of Eco Involvement di 40 kampung. Bustar sangat mendukung tindak lanjut dari diskusi online ini dalam mewujudkan program Kampung Iklim di Tanah Papua yang akan menjaga dan mewariskan budaya lokal ke masa depan. ●
(Muhammad Farid/Yayasan EcoNusa)

Program Ketahanan Pangan di Kampung Edor, Kabupaten Kaimana-Provinsi Papua Barat. Kampung ini sedang diproses menjadi Kampung Iklim. M. FARID/ECONUSA



Kegiatan pertanian di Kampung Iklim Margorukum, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat. M.FARID/ECONUSA

Kunjungan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Maluku Papua ke Kampung Iklim Margorukum, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan-Provinsi Papua Barat. M.FARID/ ECONUSA



Ruang kelas terlihat sepi di saat pandemi.

MARTHENCI I. WANGGAI/
UNIPA

Suka Duka Kuliah Daring di Masa Pandemi Covid-19

Ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, serta seluruh unit layanan mahasiswa di Universitas Papua tidak beraktivitas secara normal sejak pemerintah menerapkan kebijakan WFH (work from home) selama pandemi Covid-19. Para dosen dan mahasiswa harus bekerjasama untuk melaksanakan kuliah daring dari rumah masing-masing. Situasi belajar abnormal, kurang efektif, dan kurang interaktif ini harus dijalani hingga batas waktu yang sulit dipastikan.

Kuliah daring ini menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Whatsapp dan Email. Zoom digunakan ketika ada dosen yang ingin bertatap muka sekaligus mengajar. Google classroom digunakan ketika mengisi daftar hadir, mengumpulkan tugas, bahkan digunakan dosen untuk mengirimkan materi. Sedangkan Email dan WhatsApp lebih sering digunakan untuk memperoleh informasi dari dosen dan juga mengirim tugas ke dosen.

Ada beberapa mahasiswa yang sedikit kesulitan dalam melakukan kuliah daring akibat permasalahan akses internet keterbatasan pulsa data. Namun bantuan pulsa data dari pihak kampus cukup membantu



Kegiatan praktikum sebelum Pandemi Covid-19. MARTHENCI I. WANGGAI/UNIPA

dan mempermudah mahasiswa.

Beberapa kendala yang dihadapi ketika mengikuti kuliah daring seperti kurang paham dengan materi yang diberikan oleh dosen namun tidak dapat bertanya secara langsung, dan terkadang ada beberapa kuliah yang terpaksa harus dimundurkan karena hanya diikuti oleh beberapa mahasiswa yang aktif saat itu.

Sebagai mahasiswa Program Studi

Biologi, situasi Pandemi Covid-19 ini sangat merugikan, karena tidak dapat melakukan kegiatan praktikum, sebaliknya digantikan dengan tugas. Padahal, praktikum itu sangatlah penting dalam mendukung teori.

Rindu kembali ke kampus, mendengar ceramah dosen, masuk laboratorium, kunjungan praktek lapangan hingga wisuda. Semoga pandemi Covid-19 segera berlalu dari bumi kita. ●

(Marthenci I. Wanggai/UNIPA)

GALERI



Tim Ekonomi Berkelanjutan Provinsi Papua Barat bersama IDH saat mempersiapkan Pertemuan tingkat tinggi investasi hijau di Papua dan Papua Barat (Rabu, 15/1/2020). DOK. BALITBANGDA



Penyerahan simbolis bantuan alat-alat pertanian oleh Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) kepada Gubernur Provinsi Papua Barat (Drs. Dominggus Mandacan), Sorong 27 Februari 2020. DOK. BALITBANGDA



Kontainer pengangkut biji kakao Ransiki kualitas premium, di Pelabuhan Laut Manokwari-Provinsi Papua Barat (Kamis, 9/1/2020). DOK. BALITBANGDA



Gubernur Papua Barat, bersama Pejabat Pemda Kabupaten Mansel, pengurus Koperasi Ebier Suth Cokran dan Para Investor saat mengikuti acara pelepasan ekspor perdana biji kakao Ransiki kualitas premium, di Pelabuhan Laut Manokwari-Provinsi Papua Barat (Kamis, 9/1/2020). DOK. BALITBANGDA

Persiapan pendistribusian
bapak oleh Tim Bapak
Provinsi Papua Barat, di
Gudang Bulog, Kabupaten
Manokwari-Provinsi
Papua Barat (Sabtu,
30/5/2020).

DOK. BALITBANGDA



Pendistribusian bapak
oleh Tim Bapak Provinsi
Papua Barat (Sabtu,
30/5/2020).

DOK. BALITBANGDA



Kakanwil Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba, SH. M.Si sebagai keynote speaker saat menyampaikan materi terkait Hak Kekayaan Intelektual dan manfaatnya bagi lembaga Litbang pada Diseminasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian BALITBANGDA Provinsi Papua Barat di Swiss belHotel Manokwari-Provinsi Papua Barat (Selasa, 11/2/2020).

DOK. BALITBANGDA



Para pembicara saat memberikan pandangannya dalam kegiatan Talk Show Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Swiss belHotel Manokwari-Provinsi Papua Barat (Kamis, 23/01/2020).

DOK. ALBERTH/ BENTARA



Keynote speaker dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri RI, Moh. Ilham A. Hamudy, S.IP, M.Soc., Sc, saat menyampaikan materi terkait urgensi diseminasi Kelitbang pada Diseminasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian BALITBANGDA Provinsi Papua Barat di Swiss belHotel Manokwari-Provinsi Papua Barat (Selasa, 11/2/2020). DOK. BALITBANGDA

GALERI

Suasana diskusi pada Diseminasi dan Publikasi Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Papua Barat di Swiss belHotel Manokwari-Provinsi Papua Barat (Selasa, 11/2/2020).

DOK. BALITBANGDA



Tarian Tradisional Sufado asal daerah Waropen pada Karnaval Budaya dalam rangka memperingati HUT Pekabaran Injil ke-165 di Tanah Papua, Manokwari-Provinsi Papua Barat (Senin, 3/2/2020). JOPAN



Tarian ritual penyembahan kepada TUHAN, oleh suku Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan pada Karnaval Budaya dalam rangka memperingati HUT Pekabaran Injil ke - 165 di Tanah Papua, Manokwari-Provinsi Papua Barat (Senin, 3/2/2020). JOPAN

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan bersama rombongan saat mengikuti kegiatan kerja bakti yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat menjelang HUT PI ke - 165 di Pulau Mansinam, Manokwari-Provinsi Papua Barat (Jumat, 24/1/2020).

DOK. BALITBANGDA



Gubernur Papua Barat (Drs. Dominggus Mandacan) bersama Wakil Gubernur Papua Barat (Mohamad Lakotani, SH., M.Si) saat mengikuti kegiatan kerja bakti menjelang HUT PI ke - 165 di Pulau Mansinam Manokwari-Provinsi Papua Barat (Jumat, 24/1/2020).

DOK. BALITBANGDA



Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan bersama para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat saat meninjau lokasi kerja bakti menjelang HUT PI ke-165 di Pulau Mansinam, Manokwari-Provinsi Papua Barat (Jumat, 24/1/2020).

DOK. BALITBANGDA

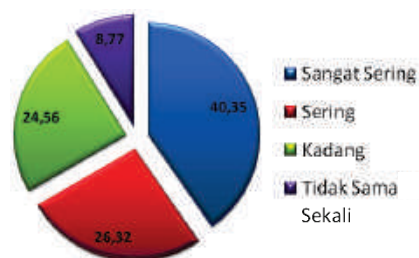
Kampung Partisipasi: Kampung Kwok, Pegunungan Arfak

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka penyusunan naskah akademik pengelolaan kawasan Cagar Alam, kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua dengan Yayasan Paradisea. Kunjungan lapangan kami yang terbilang sulit dan menantang dalam menyusuri jalan-jalan bertebing, tanah longsor, jalan yang terputus sungai, hingga terhimpit semak terbakar. Akhirnya terpampang jelas pada sebuah papan: Kampung Partisipasi, Kampung Kwok, Distrik Hing, Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebutan yang sangat jarang dijumpai di wilayah manapun "Kampung Partisipasi". Selain berbatasan langsung dengan Cagar Alam Pegunungan Arfak, Kampung Kwok juga merupakan salah satu pemukiman yang letaknya paling tinggi, sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 20 km jarak Kampung Kwok ke Ulong, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Arfak, sedangkan jarak dari Pusat Kota Kabupaten Manokwari sekitar 100 km. Topografi yang sulit menyebabkan transportasi utama daerah ini adalah kendaraan roda empat jenis Toyota Hilux atau Ford Ranger.

Walaupun rumah-rumah tinggal semi modern telah dibangun oleh pemerintah, Rumah Kaki Seribu masih menjadi pilihan hunian penduduk asli. Sebagian besar struktur bangunan Rumah Kaki Seribu ini masih tampak asli namun tidak sedikit juga yang telah memodifikasi atap dengan menggunakan seng.



Frekuensi Akses Terhadap Sumberdaya Hutan pada Cagar Alam P. Arfak



Presentase frekuensi akses masyarakat Kampung Kwok terhadap sumberdaya hutan di Cagar Alam Pegunungan Arfak.

Masyarakat Kampung Kwok sangat ulet bercocok tanam, berburu dan peramu hasil hutan. Petunjuk sangat kuat bahwa masyarakat Kampung Kwok secara turun temurun masih memanfaatkan sumberdaya hutan secara terbatas, minimal dengan cara-cara tradisional dan ramah lingkungan. Misalnya, bercocok tanam dan beternak dilakukan secara sangat sederhana dan terbatas. Demikian pula sebagai pemburu, hasil yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) dibanding untuk kepentingan bisnis. Peralatan yang digunakanpun masih sangat



Rumah Kaki Seribu dengan modifikasi atap seng di Kampung Kwok, Distrik Hingk. Tampak papan nama Kampung Kwok "kampung partisipasi".

JIMMY WANMA/UNIPA

sedehana. Hasil-hasil pertanian biasanya dijual ke pasar di Kabupaten Manokwari dengan menumpang kendaraan roda empat (Toyota Hilux atau Ford Ranger).

Sejak lama masyarakat Kampung Kwok memanfaatkan hasil hutan kayu maupun bukan kayu seperti rotan, kulit kayu dan de-



daunan; serta sumber data hutan lainnya, seperti mamalia, dan burung. Banyak sisa bagian tubuh yang tersimpan awet di rumah mereka. Skeleton atau rangka tubuh bahkan ditinggalkan oleh para pemburu di atas tungku dapur, mungkin untuk menunjukkan sebuah kebanggaan. Skeleton mamalia endemik ditemukan, yakni kuskus endemik dan Landak Papua. Kedua spesies mamalia endemik ini hidup di Pegunungan Arfak.

Selain itu, pemanfaatan kayu Arwob (*Dodonea viscosa*) sebagai pagar kebun masyarakat Kampung Kwok. Kayu Arwob juga dimanfaatkan sebagai kayu bakar karena dapat tetap menyala dengan baik sekalipun kayunya masih mentah. Menurut penuturan kepala Kampung Kwok, salah satu kebutuhan masyarakat yang tinggi adalah kebutuhan akan kayu untuk bahan ba-

Daun bawang, salah satu komoditas pertanian di Kampung Kwok. (atas)

JIMMY WANMA/UNIPA

Pemanfaatan kayu Arwob (*D. viscosa*) sebagai pagar kebun. Pagar ini dibangun dengan tujuan agar tanaman terhindar dari gangguan babi. (bawah)

JIMMY WANMA/UNIPA



Masyarakat Kampung Kwok sangat ulet bercocok tanam, berburu dan peramu hasil hutan. Petunjuk sangat kuat bahwa masyarakat Kampung Kwok secara turun temurun masih memanfaatkan sumberdaya hutan secara terbatas, minimal dengan cara-cara tradisioal dan ramah lingkungan.



Skeleton Kuskus (atas).



Skeleton Landak Papua, *Zaglossus bruijnii* (bawah).

kar, mengingat posisi kampung yang berada di daerah ketinggian sehingga suhunya sangat dingin. Kayu bakar adalah satu-satunya sumberdaya panas yang harus selalu tersedia di rumah-rumah warga.

Pemanfaatan lahan berlereng untuk pertanian di Kampung Kwok.

JIMMY WANMA/UNIPA

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan tidak sebatas pada aspek produksi hutan dan lahan hutan, tetapi juga fungsi perlindungan, fungsi tata iklim dan fungsi sosial ekonomi dan budaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara langsung maupun tidak langsung dari ekosistem hutan dalam mempertahankan hidup (*existence*) dan peningkatan kesejahteraan (*welfare*). Masyarakat asli di sekitar kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak memanfaatkan hutan sebagai tempat hidup. Fungsi tempat hidup diartikan hutan merupakan tempat mereka bercocok tanam, mendapat hasil dan sebagai bagian dari harta yang akan ada dan harus diwariskan secara turun temurun kepada generasi di masa mendatang. Ketergantungan terhadap sumberdaya lahan/hutan tercermin juga dalam akses terhadap sumberdaya. Akses terhadap sumberdaya ditunjukkan oleh frekuensi memanfaatkan kawasan hutan ketika pembukaan lahan dilakukan. Akses terhadap sumberdaya juga menjelaskan tentang jangka waktu yang digunakan terhadap lahan (kebun).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung ke alam ataupun sumberdaya hutan. Frekuensi dalam mengakses sumberdaya hutan dan lahan dengan kategori sangat sering mencapai 40% dilakoni masyarakat ketika sedang mengerjakan aktivitas bertani atau sekedar memanfaatkan beberapa hasil hutan kayu (sebagai bahan bakar, bahan bangunan, pagar kebun/ rumah) dan hasil hutan bukan kayu. Masyarakat asli yang berprofesi sebagai PNS atau aparat kampung yang sebagian waktu dihabiskan di kantor ataupun sekolah menyatakan sering dan kadang-kadang mengakses sumberdaya hutan dan lahan.

Lahan berlereng, miring dan terbuka sangat eksotik di mata kami. Para pembidik pemandangan bentang alam, ini adalah keindahan namun barangkali bagi masyarakat Kampung Kwok bentuk lahan ini adalah "tantangan dan keuletan". ●

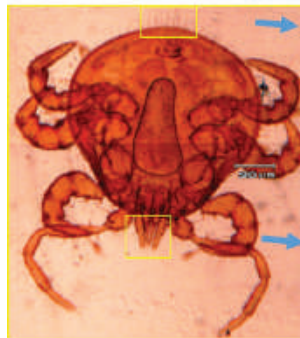
(Keliopas Krey dan Jimmy Wanma/UNIPA).



Salah satu jenis ular putih yang berhasil ditangkap. KELIOPAS KREY/UNIPA

Tungau Acarina: Ektoparasit Ular Putih (*Micropechis ikaheka*)

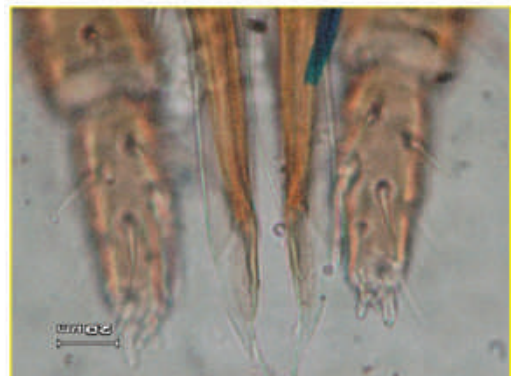
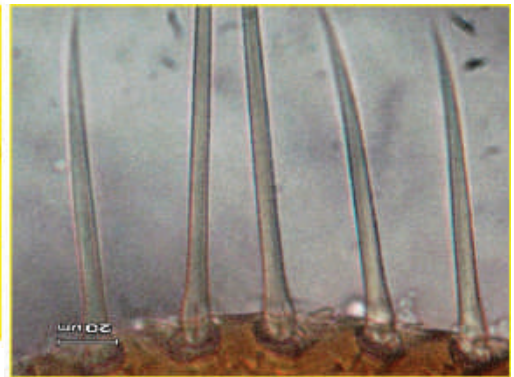
Ektoparasit adalah jenis parasit yang hidup pada luar tubuh dari hewan inangnya. Salah satu ektoparasit adalah tungau yang termasuk dalam kelas *Arachnida* (kelompok laba-laba). *Acarina*, *Ophiomegistus luzonensis*, yang memparasit ular putih, berasal dari bangsa *Parasitiformes*, marga *Ophiomegistus*. Parasit ini tumbuh dan sangat



Kiri: Tungau, *Ophiomegistus luzonensis*. Preparasi menggunakan Metode Whole Mount

Kanan atas: Seta pada posterolateral, struktur kecil seperti bulu-bulu yang berfungsi membantu tungau melekat dan bergerak pada kulit ular

Kanan bawah: Ujung celicera, meruncing seperti jarum berfungsi untuk menusuk tubuh ular.



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

tergantung hidupnya pada ular putih (*M. ikaheka*) sebagai inang (*host*). Acarina hidup dengan menghisap darah dengan menusuk celicera ke dalam pori-pori permukaan tubuh ular putih. Mereka hidup sebagai parasit sepanjang siklus hidupnya, menghisap sisik bagian perut ular dengan memanfaatkan celah-celah di antara sisik perut ular.

Ular ini sangat beracun, mematikan dan dapat hidup di sekitar pemukiman, sehingga perlu diketahui dan diwaspadai oleh manusia. Ular Putih, *Micropechis ikaheka*, ter-

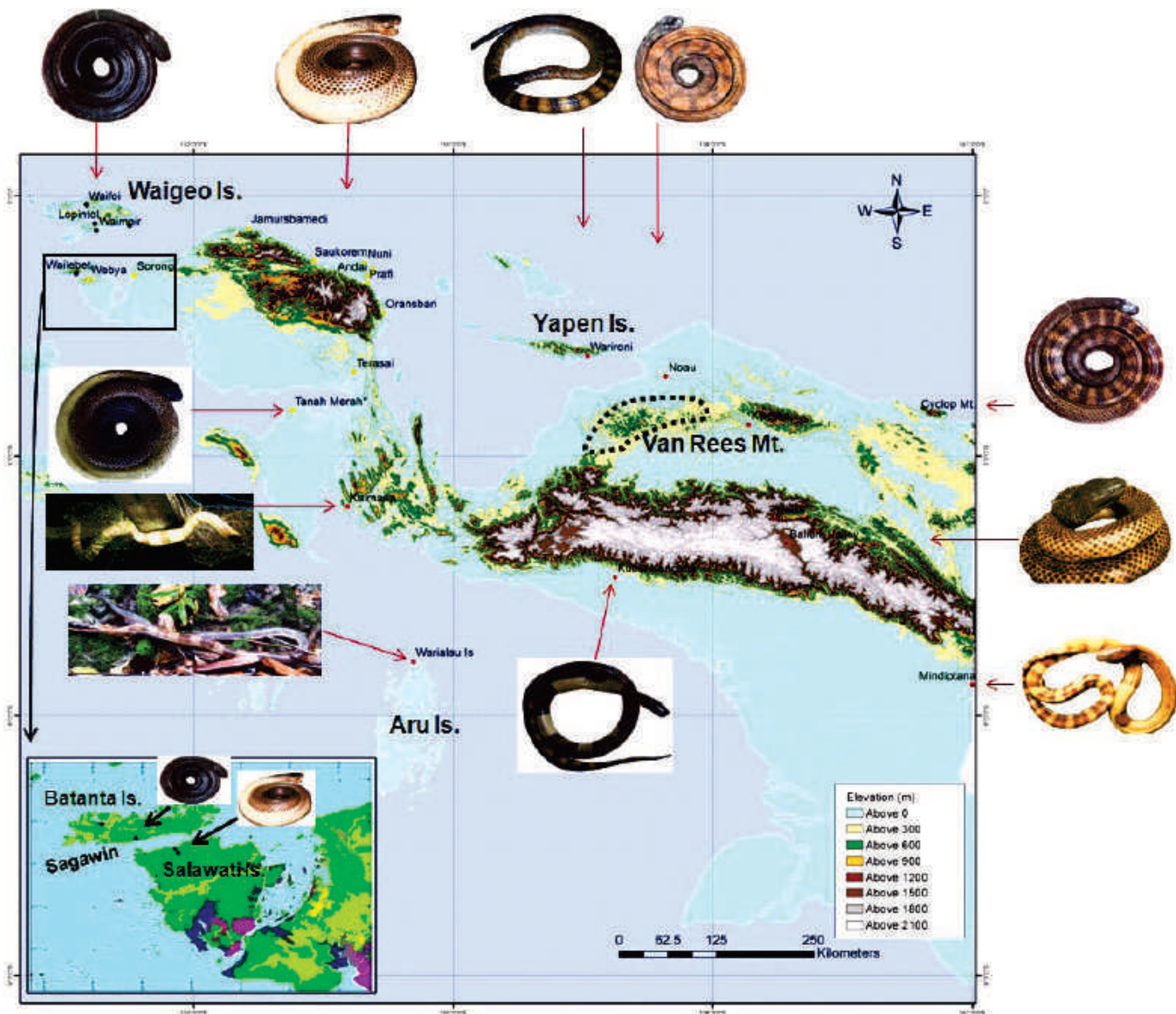
sebar luas di daratan utama Papua hingga Papua New Guinea termasuk pulau-pulau satelit. Hadir dengan berbagai variasi warna yang menarik, namun ular sangat beracun dan mematikan ini merupakan kelompok ular nokturnal (aktif pada waktu malam), namun sering teramati pada siang hari hanya berdiam diri atau beristirahat (tidur) di antara serasah pada substrat lantai hutan. Mereka akan bergerak pada malam hari untuk melakukan aktivitas seperti mencari makan. Kebiasaan hidup ular ini yang kontak langsung dengan tanah, serasah, tum-

pukan kayu menyebabkan sangat mudah kemasukan parasit Acarina.

Ophiomegistus luzonensis

Sampai saat ini belum ada catatan bahwa ular putih menetas bersama ektoparasit, begitu pula sama sekali belum ada catatan mengenai pola hidup Acarina di habitat aslinya, peran penting dalam ekologi hutan, dan potensi ancaman pada manusia. Butuh penelitian lanjutan. ●

(Keliopas Krey/UNIPA)



Distribusi geografis dan variasi warna ular putih, *Micropechis ikaheka* di Papua.

Pulau Gam, Raja Ampat: Potensi dan Pesona Blue Water Mangrove untuk Ekoturisme Hingga Hidupan Liar dan Ancamannya



Bayi dan induk *Spilocuscus papuensis*. KELIOPAS KREY/UNIPA

Gambaran Umum Pulau Gam

Sejarah geologi, luas wilayah, keragaman ekosistem dan vegetasi sangat berkontribusi terhadap komposisi dan distribusi spesies saat ini. Pulau Gam di Raja Ampat adalah habitat alami yang sangat mendukung biologi hidupan liar, berbagai interaksi ekologi, hingga keberlanjutan fungsi-fungsi sosial di pesisir pantai dan laut. Hadir dengan penciri topografi berbukit terjal ditutupi oleh batuan kapur (limestone) mengindikasikan drainase lahan yang sangat sulit dan sebagian besar tidak akan tergenang secara musim-

an. Aliran air terbatas hanya pada celah-celah batu dan juga goa. Lantai hutan berbatu dengan top soil sangat tipis di Pulau Gam juga memungkinkan secara cepat air hujan akan mengalir dan menghilang begitu saja.

Habitat-habitat di Pulau Gam merupakan bagian dari ekosistem hutan dataran rendah (0 - 200 m dpl). Sebagian besar merupakan hutan daratan, mangrove dan areal non hutan. Daerah-daerah basah sangat sulit dijumpai, dan umumnya merupakan hutan-hutan daratan yang terletak pada

lembah-lembah sempit antar tebing batu.

Blue water mangrove adalah salah satu habitat utama mangrove dari Pulau Gam yang memiliki penampakan sangat menarik, unik dan indah. Birunya air laut yang sangat jernih dan tenang memantulkan bayangan semua objek di sekelilingnya. Saat mendayung perahu, seolah-olah kita sedang mendayung di atas lautan kaca menjadi ciri khas habitat blue water mangrove Pulau Gam. Habitat mangrove yang terletak di utara Pulau Gam ini belum ba-



nyak diketahui orang. Selain telaga ubur-ubur yang melimpah ubur-uburnya, habitat mangrove ini sangat kaya akan berbagai organisme laut, burung, dan tebing kartz yang menjulang tinggi dari dalam air seperti dinding-dinding batu raksasa. Berbagai jenis tumbuhan dapat dijumpai pada tebing-tebing kartz.

Flora dan Fauna

Pola sebaran vegetasi hutan daratan umumnya sangat khas mengikuti pola sebaran tanah berkarang yang ketersediaan hara tanahnya sangat terbatas. Lantai hutan berbatu sangat menyulitkan penyebaran dan pertumbuhan vegetasi sehingga turut mempengaruhi sebaran dan wilayah jelajah fauna seperti burung, reptil, dan mamalia.

REKAMAN DATA SPESIES FAUNA DI PULAU GAM

Ekosistem utama di Pulau Gam adalah mangrove yang terdapat di teluk-teluk kecil, hutan daratan rendah (low lying forest), dan hutan bukit rendah (lower hill forest). Hutan sekunder dengan tipe ve-



1. *Phalanger orientalis*.
2. *Syconycteris australis*.
3. *Platymantis batantae*, katak tanah berukuran kecil.
4. *Paranyctimene raptor*.
5. *Morelia viridis* satu-satunya ular lindungan di Papua.
6. *Nyctimene albiventer*.

KELIOPAS KREY/UNIPA

Takson	Jumlah Spesies
Ular (Ophidia)	6
Kadal (Sauria)	15
Buaya (Crocodylia)	1
Katak (Anura)	7
Mamalia berkantung (Marsupial)	5
Kelelawar (Chiroptera)	7
Tikus (Rodentia)	2
Burung (Aves)	27
Total spesies :	70

getasi hutan hujan daratan rendah dengan beberapa tumbuhan tepi yang umum dan sering dijumpai seperti *Terminalia catapa*, *Intsia sp*, *Cycas ruminiata*, *Ficus spp*, *Octomeles sumatrana* dan spesies lainnya. Disamping itu, pada hutan punggung bukit terdapat tumbuhan seperti *Cycas ruminiata*, *Xanthophyllum papuanum*, *Ficus sp*, *Livistona sp.*, palem, anggrek dan tumbuhan liar lainnya.

Berbagai spesies fauna liar ini mendiami ekosistem pantai, mangrove, hutan berbukit rendah, lembah-lembah sempit, hingga



1. Melimpah, populasi burung pantai.

KELIOPAS KREY/UNIPA



2. Elang bondol di pulau Karufear, top predator terancam mati "jerat tali".

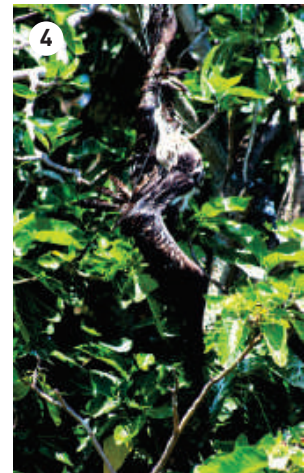
KELIOPAS KREY/UNIPA

3. Kelelawar di Pulau Mioskon, terancam perburuan karena dagingnya untuk dimakan.

STEVE WAWIYAI /UNIPA

4. Terperangkap tali jerat di pulau Karufear, tiga individu burung ini mati.

KELIOPAS KREY/UNIPA



pulau-pulau karang kecil. Walaupun merupakan fauna endemik New Guinea, kebanyakan dari mereka memiliki persebaran yang luas di daratan Papua dan pulau-pulau sekitar. Tercatat sebanyak 70 spesies fauna liar menghuni Pulau Gam yakni Marsupial (mamalia berkantung), Chiroptera (kelelawar), Rodentia (tikus), herpetofauna (reptil dan amfibi), dan burung.

Tidak kalah menarik dari Pulau Gam adalah keberadaan spesies burung laut yang sering bermigrasi harian untuk *feeding* sehingga daerah jelajah populasi mereka cukup luas. Dua spesies burung endemik *Paradisaea* dapat ditemukan disini, yaitu cenderawasih merah (*Paradisaea rubra*) dan cenderawasih botak (*P. respublica*). Selain itu jenis burung maleo waigeo (*Aepyodius bruijnii*) yang dikenal hanya dari perbukitan Waigeo dan Batanta.

Catatan Tempat Penting untuk Pengamatan Flora dan Fauna

Masih sangat sulit aksesibilitas ke hutan primer di tengah Pulau Gam. Beberapa lo-

kasi yang ditandai sebagai tempat penting untuk pengamatan beberapa spesies katak, reptil, burung dan mamalia berada di bagian utara, selatan, dan timur pulau Gam, yaitu:

Durmangkintus, hutan punggung bukit bagian timur kampung Yembeser (S: 00° 28' 02.5"; E: 130° 40' 39.2"; elevasi 66 m dpl)

Warbeki, lembah tempat sumber air bersih ± 3.1 km utara kampung Yembeser (S: 00° 26' 54.9"; E: 130° 39' 36.1"; elevasi 78 m dpl)

Warmangkrawkraw, lembah sempit di bagian barat kampung Yembeser (S: 00° 26' 28.3"; E: 130° 41' 15.3"; elevasi 38 m dpl)

Pulau Mioskon (Pulau Kelelawar), pulau kecil di bagian timur pulau Gam (S: 00° 29' 48.8"; E: 130° 43' 21.8"; elevasi 29 m dpl)

Pulau Karufear, pulau karang kecil di bagian timur pulau Gam (S: 00° 30' 55.3"; E: 130° 40' 23.7"; elevasi 11 m dpl)

Telaga ubur-ubur (Karweu), telaga sempit di site blue water mangrove (S: 00° 28' 56.3"; E: 130° 40' 56.3"; elevasi 16 m dpl).

Yenbua, stasion pengamatan di atas bukit setinggi 211 m dpl di site blue water mang-

rove (S: 00° 29' 01.8"; E: 130° 39' 44.2").

Warekaf, goa air di dekat teluk Kabui (S: 00° 25' 22.5"; E: 130° 34' 34.7"; elevasi 79 m dpl).

Batu tajam, beberapa pulau batu kecil di utara pulau Gam (S: 00° 24' 34.4"; E: 130° 38' 47.1"; elevasi 14 m dpl).

Selat Kabui yaitu selat sempit antara pulau Gam dan pulau Waigeo (S: 00° 25' 51.1"; E: 130° 33' 29.1"; elevasi 14 m dpl).

Ancaman Bagi Hidupan Liar

Hidupan liar yang terekam dari Pulau Gam menggambarkan kesehatan lingkungan yang baik dan mencerminkan pengelolaan alam yang lestari oleh masyarakat setempat. Walaupun demikian, terdapat beberapa ancaman serius yang ditemukan untuk dicari solusi penanggulangannya. Ancaman pertama adalah potensi kebakaran hutan. Beberapa titik hutan punggung bukit di sekitar kampung Yenbeser pernah terbakar pada tahun 1980 an (hasil wawancara dengan masyarakat setempat). Ancaman kedua adalah perburuan menggunakan perangkap (tali jerat) dan senapan



1



2



3

1. Blue water mangrove, view cantik untuk ekoturisme dan bird watching.

DOK.BALITBANGDA

2. Karweu, telaga ubur-ubur dengan vegetasi mangrove dan kartz. Ubur-ubur sangat melimpah dalam telaga ini. KELIOPAS KREY/UNIPA

3. Warbeki, lembah dengan goa tempat sumber air bersih.

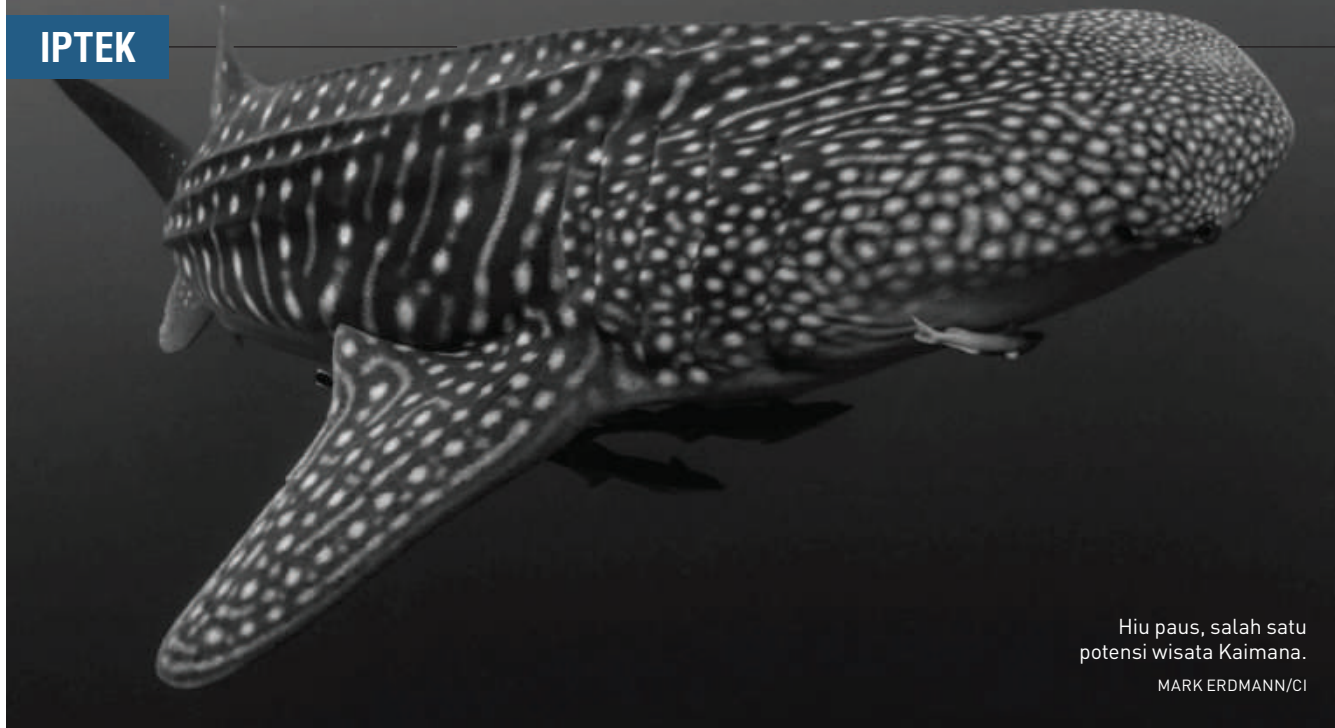
KELIOPAS KREY/UNIPA

Ekosistem utama di Pulau Gam adalah mangrove yang terdapat di teluk-teluk kecil, hutan daratan rendah (*low lying forest*), dan hutan bukit rendah (*lower hill forest*).

angin. Banyak burung dijumpai telah mati tergantung di cabang pohon karena terikat tali jerat, sementara kelelawar biasanya diburu oleh orang dari luar Pulau Gam dengan menggunakan senapan angin.

Marsupial seperti *Spilocuscus maculatus* dan *Phalanger orientalis* saat ini berhadapan dengan ancaman paling besar untuk kelangsungan hidupnya yakni kerusakan habitat hutan daratan rendah, yang disebabkan oleh penebangan besar-besaran dan makin banyaknya akses jalan yang dibuka. Saat ini di Pulau Gam belum tampak ancaman ini, namun demikian perlu diwaspadai. ●

(Onasius Matani/Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat; Keliopas Krey/UNIPA)



Hiu paus, salah satu potensi wisata Kaimana.

MARK ERDMANN/CI

Pemanfaatan Data Satelit Dalam Perencanaan Wisata Hiu Paus

Papua Barat memiliki keindahan alam dan keanekaragaman ekosistem dan hayati yang unik dan menarik di Indonesia maupun dunia. Hampir setiap tempat di Papua Barat dapat dijadikan tujuan wisata, mulai laut, pulau terpencil atau jenis habitat tertentu. Tergantung dari minat wisata dan bagaimana pelaku wisata membuat paket dan objek wisatanya. Walaupun sebagian besar tempat di Papua Barat berpotensi sebagai destinasi wisata, tetapi belum tentu bisa “disulap” menjadi wisata yang berkelanjutan. Jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, maka tidak mustahil potensi pengembangan wisata menjadi sia-sia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita mengenal “*tragedy of common*”.

Tragedy of common adalah satu pandangan atau pemikiran yang muncul sekitar tahun 1833, dan menggambarkan bahwa sumber daya alam jika tidak dikelola dengan benar dan tanpa aturan tidak akan berhasil atau bahkan rusak dan hilang nilai ekonominya. Kita melihat “gejala” *tragedy of common* di Papua Barat, ketika kawasan Raja Ampat berhasil dikelola (pada sekitar tahun 2000) dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar dan berhasil meningkatkan

perlindungan ekosistem dengan adanya patroli rutin dan kegiatan konservasi lainnya. Banyak daerah seakan berlomba-lomba untuk membuat “raja empat” baru, tetapi banyak yang belum berhasil, bahkan merugi, karena tidak direncanakan dengan baik. Tulisan ini menyampaikan salah satu pendekatan sains dalam perencanaan dan pengembangan wisata hiu paus.

Hiu paus sebagai objek wisata

Hiu paus (*Rhincodon typus*) - atau iri ombo bagi masyarakat di kampung-kampung sekitar Selat Beccari, Kaimana – merupakan ikan terbesar di dunia, yang dipercaya oleh para peneliti dapat tumbuh mencapai panjang 18 meter dengan berat lebih dari 20 ton. Hiu paus merupakan salah satu jenis hewan yang terancam punah, dimana hiu ini termasuk dalam kategori terancam (endangered) dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List). Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah memberikan status perlindungan penuh kepada hiu ini melalui KEPMEN-KP No.13 tahun 2013, mempertimbangkan potensi ekonomi besar yang dapat diberikan oleh hiu ini apabila dijaga keberlangsungan hidupnya sebagai aset pariwisata bahari, dibandingkan apabila dibu-

nuh dan dijual seluruh bagian tubuhnya.

Pariwisata berbasis hiu paus telah banyak dikembangkan di seluruh dunia dan telah memberikan manfaat langsung kepada perekonomian masyarakat lokal. Contohnya di sebuah kota kecil di Filipina bernama Donsol, beberapa nelayan yang dulunya menangkap hiu untuk diambil siripnya, sekarang menjaga hiu paus untuk pariwisata. Kegiatan ini secara cepat meningkatkan kehidupan perekonomian di kota tersebut, dimana dapat dilihat perkembangannya dari jumlah wisatawan yang datang, pada tahun 1999 sebesar 200 orang dan pada tahun 2009 tercatat hingga 20.000 wisatawan. Dampak secara ekonomi dialami juga di Maldives, dimana wisatawan rela mengeluarkan 10 juta US Dollar atau sekitar 140 miliar rupiah untuk dapat berenang dengan hiu paus. Negara lain seperti Belize, Seychelles, dan Australia juga menjaga industri pariwisata hiu paus tersebut, yang seringkali hanya berlangsung selama 6 sampai 12 minggu, ketika hiu paus berada di perairan mereka.

Sejak diamati pada sekitar tahun 2012, hiu paus di Kaimana telah mulai mena-

rik wisatawan untuk datang dan berenang. Hiu paus di Kaimana pertama kali dijumpai berenang-renang di sekitar bagan – sebuah platform perikanan tradisional dari Sulawesi Selatan untuk memakan ikan-ikan puri (teri) yang ditangkap oleh nelayan. Interaksi hiu paus dengan bagan ini, juga dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia, dan telah menjadi salah satu platform pariwisata hiu paus. Walaupun demikian, masih banyak informasi yang belum diketahui para peneliti tentang biologi, perilaku, dan pergerakan hiu paus. Hiu paus dipercaya sebagai spesies yang bermigrasi jauh, dan informasi tentang pergerakannya akan menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis hiu paus.

Sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang, 6 individu hiu paus telah dipasang penanda satelit finmount di Kaimana. Beberapa individu hiu paus yang telah dipasang penanda satelit ini menunjukkan bahwa mereka melakukan pergerakan yang cukup jauh keluar dari perairan Kaimana. Beberapa diantaranya keluar hingga Laut Arafura, Laut Seram, dan Laut Banda, namun menariknya beberapa individu terlihat kembali ke perairan sekitar Triton, Kaimana. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bergerak keluar, perairan Kaimana masih merupakan habitat penting bagi hiu paus ini. Diduga kuat adanya habitat perairan dan pesisir Kaimana, terutama hutan bakau, menjadi alasan pentingnya kehadiran hiu paus di sini.

Informasi pergerakan hiu paus ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kaimana. Pemantauan selama 2 tahun (2016-2018), hiu paus lebih sering muncul pada Januari – Desember dan April – Maret, dan lokasi kemunculan di Teluk Triton, terutama di Muara Beccari. Data ini tentunya sudah dapat digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk pemasaran wisata hiu paus. Tentunya masih diperlukan data lainnya, misalnya banyak kehadiran dalam setiap minggu, sehingga dapat menentukan kuota berapa banyak wisatawan yang dapat ijin untuk melihat satwa ini tanpa mengganggu kegiatan mereka mencari makan dan aktifitas lainnya. Dalam wisata satwa liar, banyak negara telah menerapkan kuota per tahunnya dan untuk menjamin ada pemasukan yang memadai dari wi-

sata satwa liar, tiket masuk akan dilelang sehingga mendapat pemasukan yang lebih memadai, jika dibandingkan dengan penjualan tiket masuk seperti biasanya.

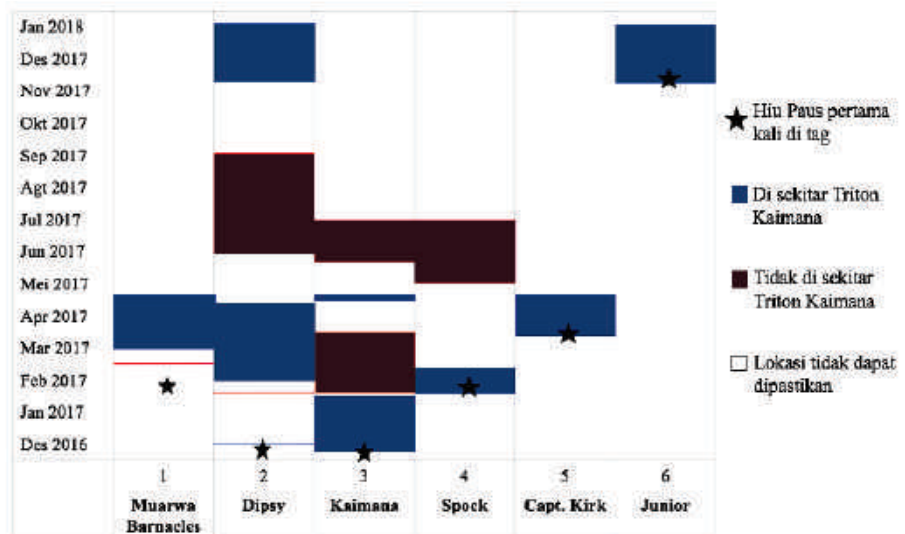
Untuk Dinas Parawisata, data bisa digunakan untuk menentukan kabupaten atau lokasi mana saja yang dikembangkan wisata hiu paus, agar kegiatan pengembangan wisata tidak sia-sia. Kenyataan bahwa hiu paus hanya muncul pada waktu-waktu tertentu saja (Januari – Desember dan April –

Tragedy of common adalah satu pandangan atau pemikiran yang muncul sekitar tahun 1833, dan menggambarkan bahwa sumber daya alam jika tidak dikelola dengan benar dan tanpa aturan tidak akan berhasil atau bahkan rusak dan hilang nilai ekonominya.

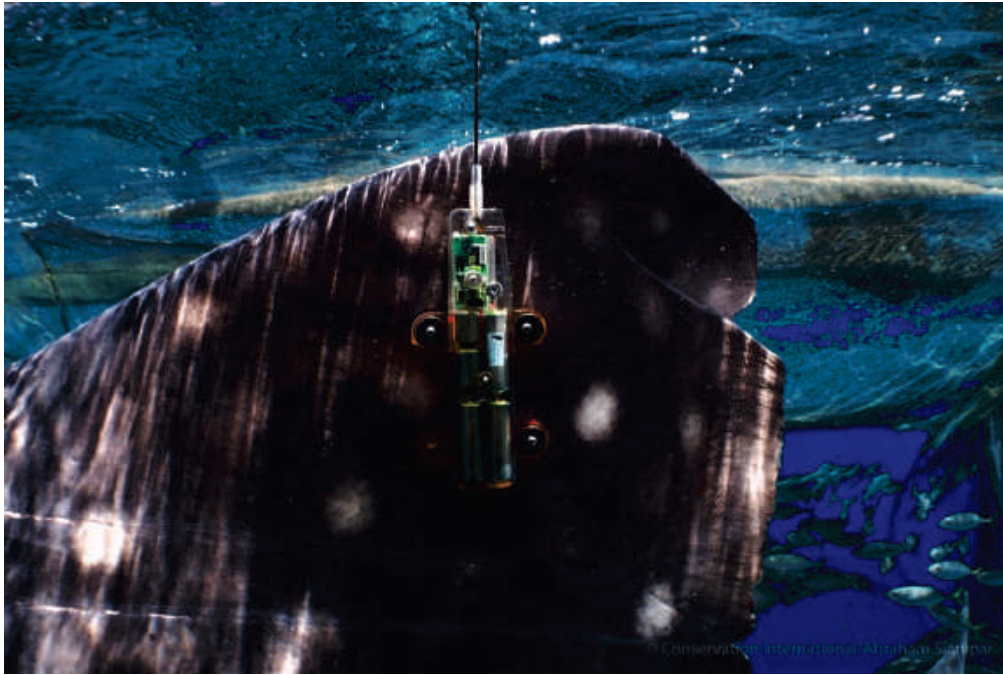
Maret) bisa digunakan untuk menentukan pembangunan jenis infrastruktur apa yang paling tepat, dan berkelanjutan serta efisien (karena hanya akan digunakan 4 bulan dalam setahun), atau menyusun kegiatan wisata lain yang dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun selama tidak ada kegiatan wisata paus.

Potensi hiu paus sebagai objek ekowisata perlu dipertimbangkan juga dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kaimana, mengingat faktanya bahwa pariwisata tidak mungkin berdiri sendiri. Tentunya diperlukan kesiapan aspek lain seperti infrastruktur, tidak hanya secara fisik namun juga berupa sistem dan partisipasi dari berbagai elemen. Salah satunya bagaimana masyarakat Kaimana dapat menjadi "host" utama dari kegiatan ekowisata berbasis hiu paus ini, mengkaji kesiapannya, dan memastikan masyarakat dapat mengoptimalkan kesempatan ini untuk perekonomian mereka. Pergerakan hiu paus ini juga menyoroti pentingnya menjaga perairan Kaimana sebagai habitat penting berbagai individu hiu paus tetap lestari, memastikan aset pariwisata ini tetap nyaman berenang di perairan Kaimana. ●

(Indes Ayostina dan Yance de Fretes/ Conservation International/CI)



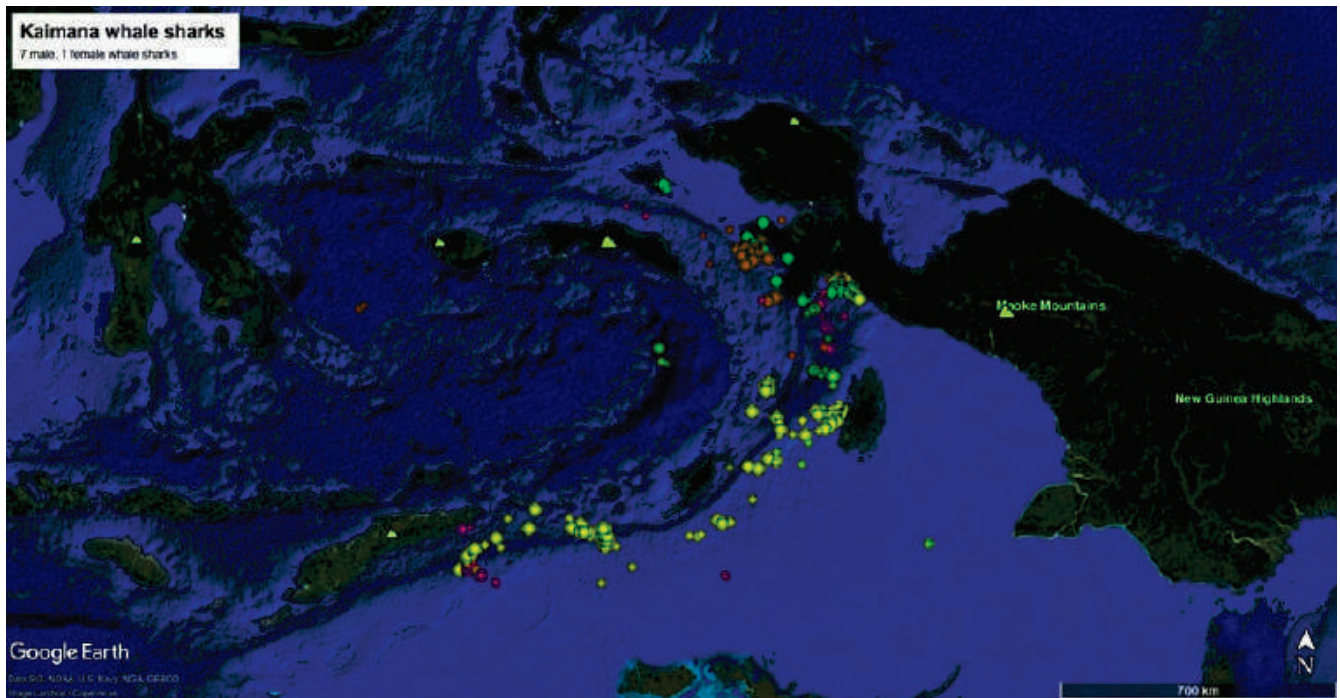
Ilustrasi kemunculan hiu paus di sekitar wilayah perairan Triton, Kaimana selama dua tahun terakhir. Diamati pada bulan Februari hingga awal Mei terdapat 3 individu hiu paus di wilayah perairan yang dipertimbangkan berpotensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata berbasis hiu paus.



Tag satellite finmount SPLASH10-346A yang dipasangkan pada sirip punggung hiu paus di Kaimana. ABRAHAM SIANIPAR/CI



Hiu paus sedang berenang-renang di sekitar kapal bagan untuk memakan ikan-ikan puri. ABRAHAM SIANIPAR/CI



Pergerakan dari 8 individu hiu paus yang ditandai di Kaimana. Polygon berwarna orange menunjukkan wilayah yang dianggap cukup berpotensi untuk mengembangkan ekowisata berbasis hiu paus.



**Pimpinan dan Seluruh Staf
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

Mengucapkan

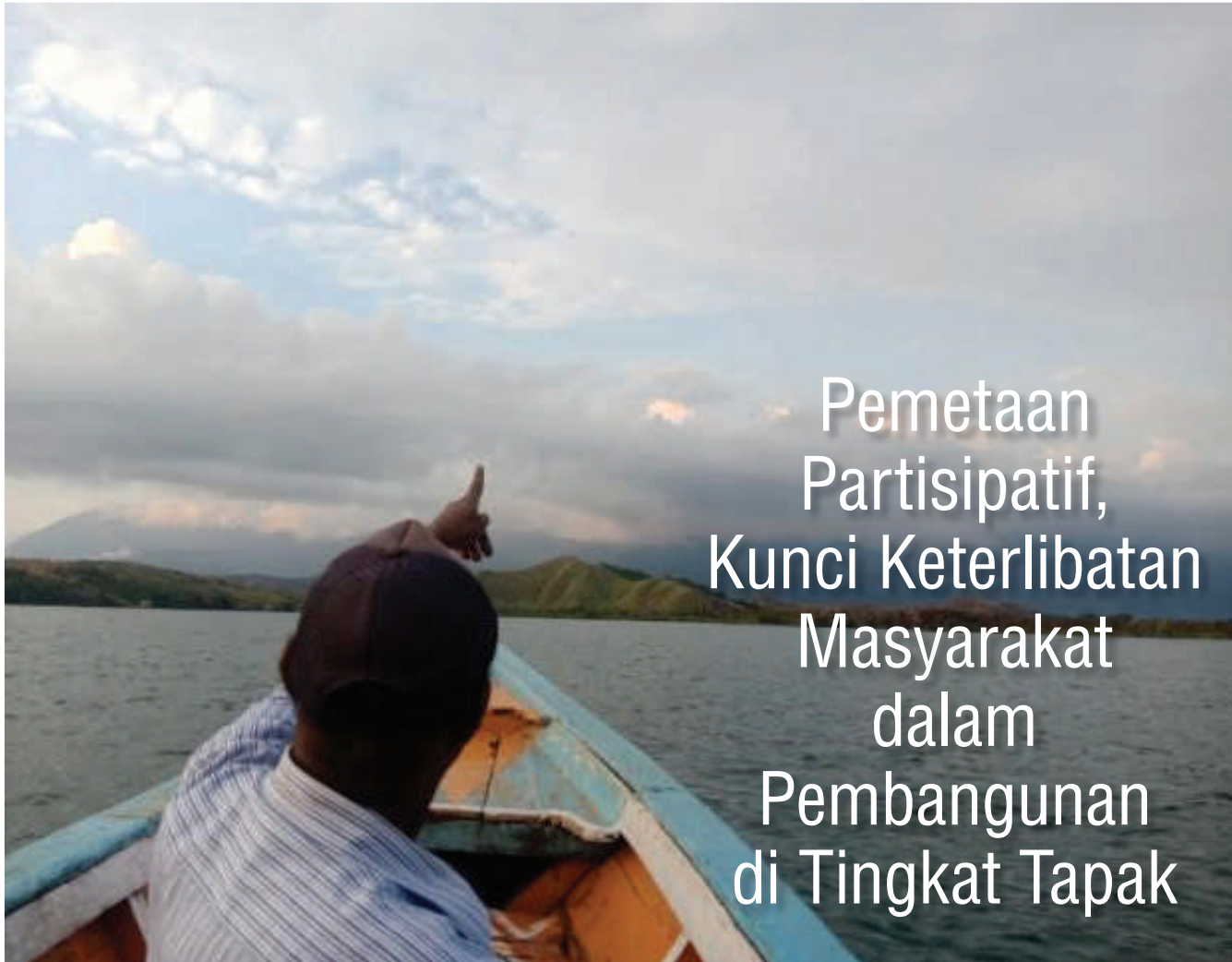
Selamat Merayakan

HUT PEKABARAN INJIL ke - 165 Tahun

"Celakalah Aku Jika Aku Tidak Memberitakan Injil" (1 Kor.8:16)

Mansinam, 5 Februari 1855 - 5 Februari 2020





Pemetaan Partisipatif, Kunci Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Tingkat Tapak

Salah satu warga di wilayah Waibu. HENDRIKA WULANDARI/WRI

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah selalu dituntut untuk terus mengembangkan program-program pembangunan. Agar tepat sasaran, perencanaan program-program pembangunan tersebut perlu didasarkan pada situasi nyata di lapangan yang mencakup kondisi fisik kawasan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Melalui peta, kondisi-kondisi ini dapat tergambar dengan baik dan mudah dipahami.

Khusus untuk perencanaan pembangunan di wilayah adat, pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, perlu menyusun peta wi-

layah adat untuk memotret pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan lahan berbasis kearifan lokal di suatu wilayah adat untuk mengetahui dinamika perubahan yang terjadi di tingkat tapak saat ini. Pembuatan peta wilayah adat menggunakan metode pemetaan partisipatif lebih menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam menuangkan pengetahuan tentang ruang yang mereka tinggali ke sebuah bidang datar. Berikut beberapa keunggulan pemetaan partisipatif dibanding pendekatan pemetaan lainnya.

Potret Tata Ruang yang Detail

Peta memiliki kegunaan sebagai alat

dokumentasi keadaan di suatu wilayah terkait dengan batas maupun penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan di dalam wilayah tertentu. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pembuatannya, seperti menggambar sketsa kampung dengan pengetahuan keruangan yang mereka miliki serta memasukkan norma-norma adat yang biasanya digunakan dalam pengelolaan suatu wilayah, peta tersebut dapat menggambarkan seluruh informasi masyarakat terkait tata ruang di wilayahnya dan kearifan lokal yang mengikat di dalamnya. Hal ini sangat penting mengingat peta yang dihasilkan harus mampu mendukung kepentingan masyarakat dalam kebijakan-ke-

bijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Tak hanya itu, proses penggalian informasi di tingkat tapak juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengingat kembali adat, budaya, dan kebiasaan setempat yang terkadang tidak terdokumentasi dengan baik dan hilang dimakan zaman, sehingga tongkat estafet pengetahuan terkait pengelolaan wilayah berbasis adat dapat diteruskan pada generasi muda.

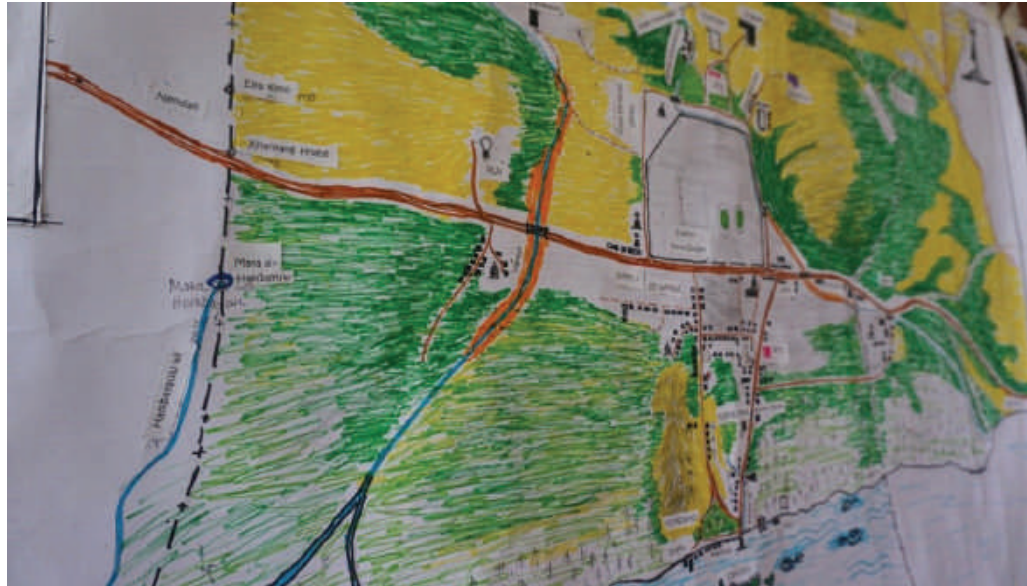
Membuka Ruang Kolaborasi yang Efektif dan Efisien

Kolaborasi yang baik di antara para pihak akan mampu menciptakan peta wilayah adat dengan proses yang efektif dan dengan sumber daya yang lebih efisien. Agar pengetahuan keruangan masyarakat dapat tergambar dengan baik, dukungan lembaga penelitian, akademisi dan LSM sangat diperlukan dalam membangun kerangka teoritis dan metodologi, termasuk kesesuaian dengan regulasi pemerintah yang ada seperti Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hasil-hasil kerja di tingkat tapak ini membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk mengakomodir hasil di lapangan sebagai dasar pembentukan kebijakan-kebijakan daerah. Kerja kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, dan LSM dapat mendorong percepatan proses pembuatan peta wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kesempatan Berbagi Pengetahuan kepada Masyarakat Lokal

Proses pemetaan partisipatif dapat terdiri dari beberapa tahap yang disebut dengan lokakarya yang melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, masyarakat adat, LSM, maupun akademisi. Dalam lokakarya tersebut, dapat diadakan pelatihan bagi masyarakat lokal terkait cara menggali data-data sosial dan data-data spasial di wilayah kampung.

Selain itu, dalam lokakarya juga dapat diberikan informasi terkait dengan pengelolaan wilayah adat untuk memberi perspektif berbeda bagi masyarakat lokal. Proses ini penting dilakukan karena masyarakat di tingkat tapak memiliki akses informasi yang



Peta sketsa Kampung Asei. HENDRIKA WULANDARI/WRI INDONESIA



Penutupan Lokakarya II oleh Asisten I Kabupaten Jayapura. HENDRIKA WULANDARI/WRI

lebih terbatas.

Adanya Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Adat Berbasis Kearifan Lokal

Beberapa peraturan telah dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penga-

kuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, Perdasus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, Perda Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan



Pengenalan Cara Penggunaan GPS kepada Masyarakat.
HENDRIKA WULANDARI/WRI



Proses Pembuatan Sketsa Wilayah Adat di Kampung Dondai, Waibu.
HENDRIKA WULANDARI/WRI

Khusus untuk perencanaan pembangunan di wilayah adat, pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, perlu menyusun peta wilayah adat untuk memotret pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan lahan berbasis kearifan lokal di suatu wilayah adat untuk mengetahui dinamika perubahan yang terjadi di tingkat tapak saat ini.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, dan Perda Kabupaten Tambrau No. 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrau.

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan kembali pentingnya batas-batas wilayah adat dan hak ulayat yang disetujui bersama. Hal ini akan lebih mudah dilakukan apabila pemetaan wilayah adat dilakukan secara partisipatif karena masyarakat menjadi pelaku utama pemetaan itu sendiri. Pendekatan penyelesaian permasalahan batas-batas wilayah adat melalui mekanisme berbasis kearifan lokal menjadi sangat efektif dan efisien sebab nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung baik di tingkat tapak.

Alat Perencanaan dan Pengakuan

Karena disusun bersama masyarakat setempat, peta-peta yang dihasilkan melalui proses yang inklusif akan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi sehingga mampu menjadi media perencanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pelestarian budaya lokal. Selain itu peta partisipatif mampu dipakai sebagai alat pengakuan formal wilayah adat demi perlindungan keberlanjutan masyarakat hukum adat.

Dengan adanya beberapa keunggulan pemetaan partisipatif tersebut, diharapkan metode ini dapat diterapkan di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat untuk menjawab beberapa tantangan pembuatan kebijakan yang berbasis situasi nyata di tingkat tapak. ●

(Hendrika T. W. Samosir/WRI)



Seorang Bocah Papua Memegang Tifa Saat Mengikuti Karnaval Di Manokwari.

JOPAN/BALITBANGDA

PANORAMA



Foto panorama :

Potret Mama Arfak (Testega) berjalan kaki dari Distrik Anggi ke kampungnya dengan memikul barang di noken. Perjalanan ini biasanya ditempuh 2-3 hari. JOPAN

©tjoe_pandori

PROMOSI



Aneka produk Coklat Ransiki.
DOK. BALITBANGDA



Kopi anggi, salah satu produk dari pegunungan arfak, papua barat. ALBERTH YOMO/BENTARA

Produk Kopi Anggi yang ditampilkan di Stan Balitbangda pada kegiatan Kompas Travel Fair Jakarta.

DOK. BALITBANGDA



Sekda Provinsi Papua Barat dan Kepala Balitbangda ketika mengunjungi Stan Balitbangda dan Biro Administrasi Pembangunan pada kegiatan Kompas Travel Fair di JCC Jakarta.

DOK. BALITBANGDA

PROFIL BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Dr. Onasius P.M Matani, S.Hut., M.Si. (DOK. PRIBADI)

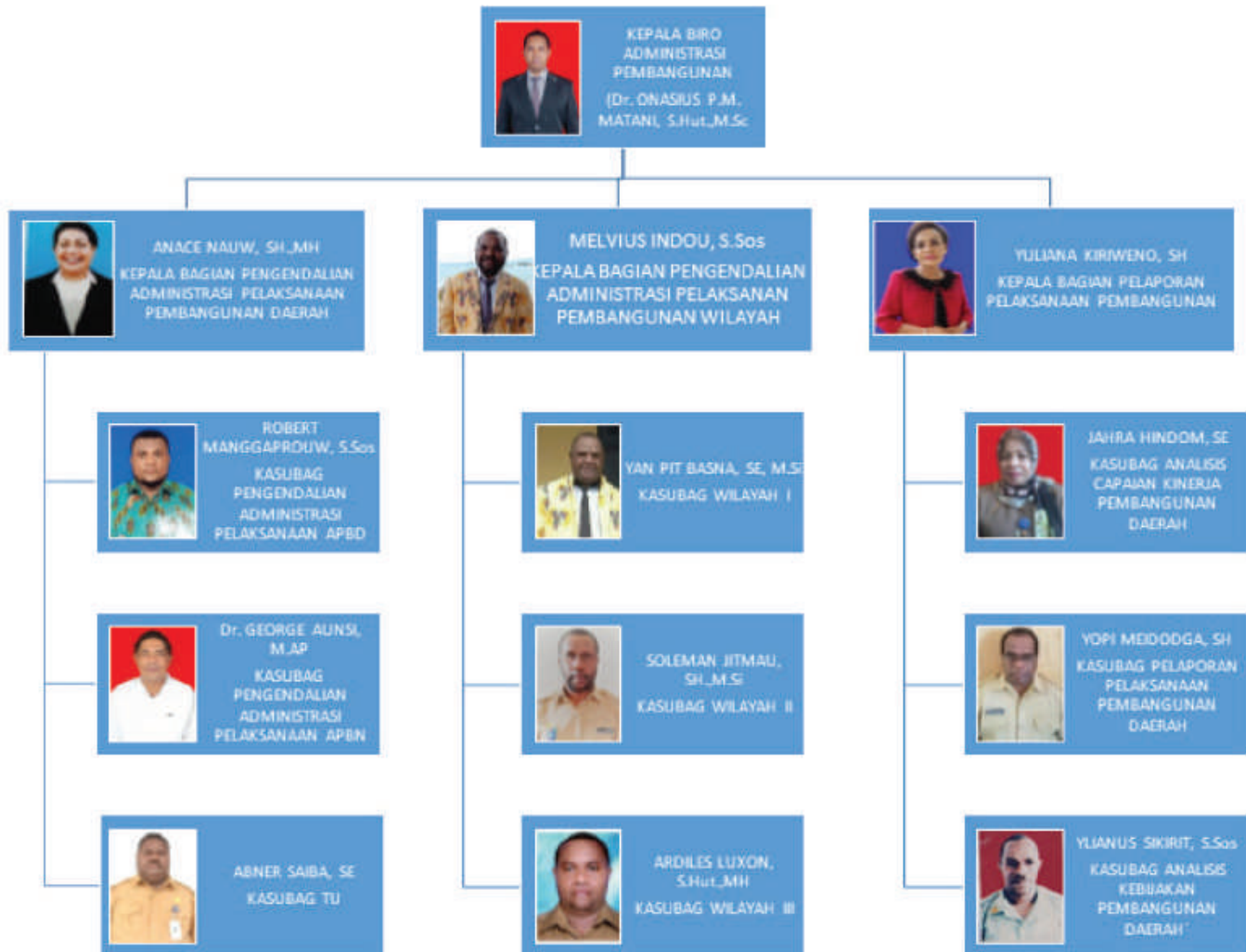
Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Barat didirikan Pada Tahun 2017, berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya sesuai Arahan Permendagri 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan pada Biro Administrasi Pembangunan pada 11 Maret 2020 oleh Gubernur Papua Barat, dengan proporsi aparatur sipil negara 18 orang dan tenaga harian lepas 24 orang.

Foto lepas :

Pria Papua memikul Tifa Raksasa dalam Parade Budaya menjelang perayaan HUT Masuknya Injil di Kota Manokwari, Februari 2020. JOPAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020 (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 56 TAHUN 2019)



TUGAS:

Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

FUNGSI:

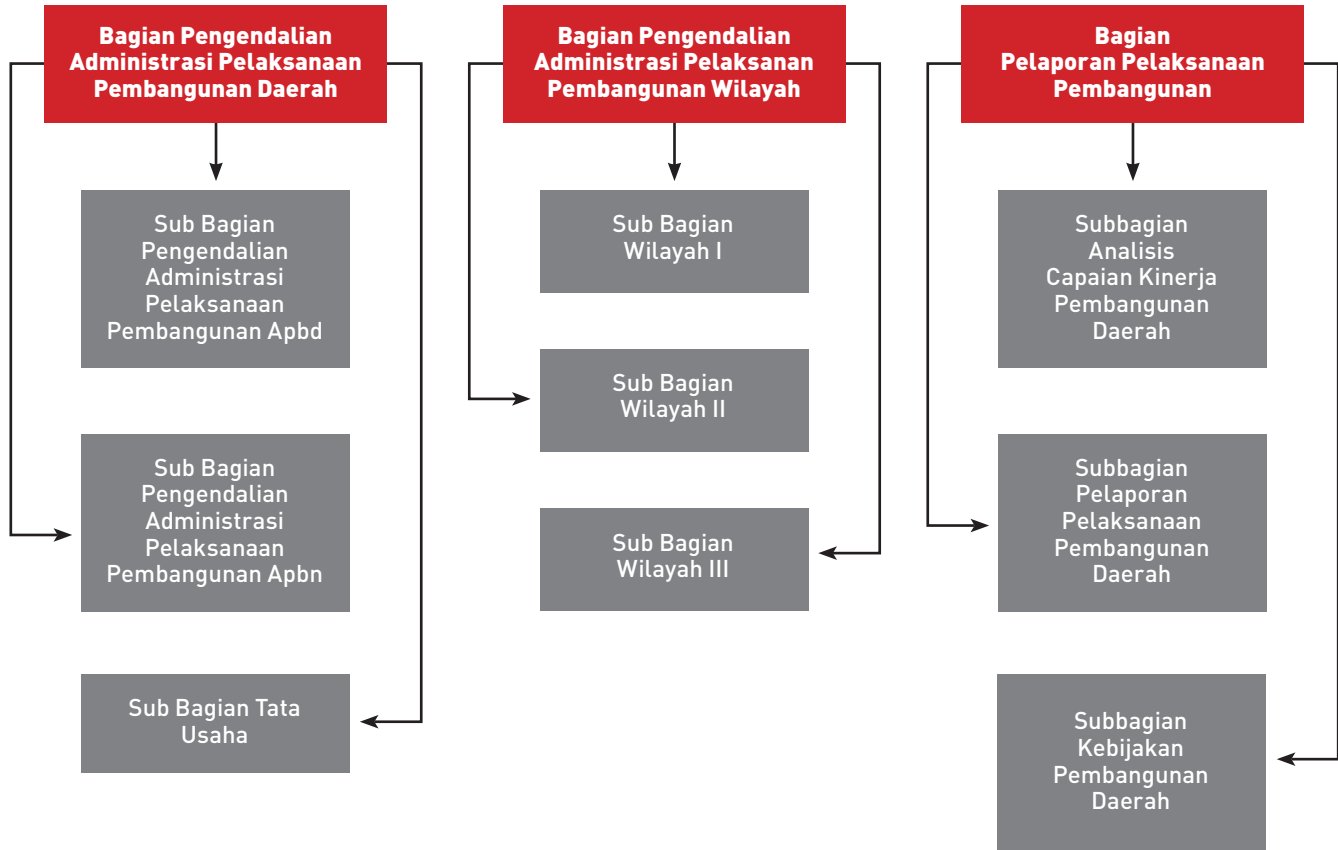
Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

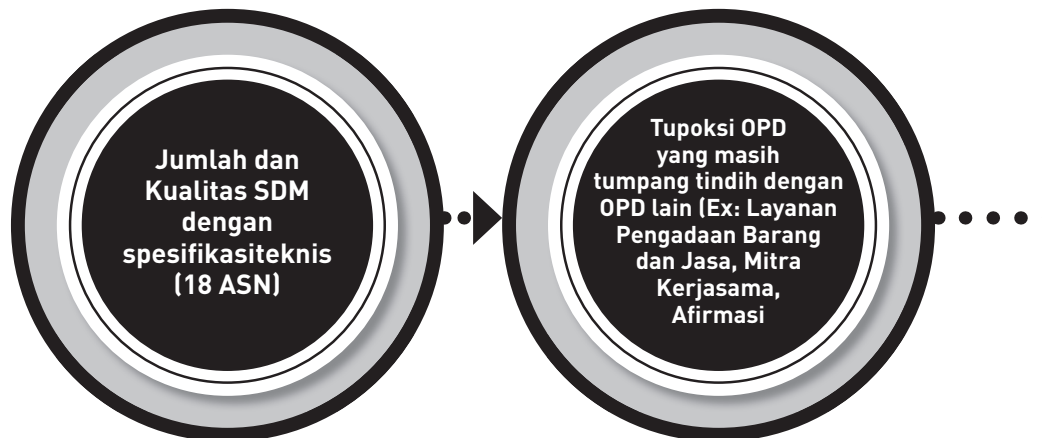
Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

STRUKTUR BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2019



PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM OPD, TERKAIT PENCAPAIAN PROGRAM



Visi dan Misi

Sesuai arahan Kementerian PAN/RB Tahun 2019, maka Visi dan Misi OPD harus sesuai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Yaitu “Mewujudkan Papua Barat Yang Aman, Sejahtera Dan Bermartabat.”

Selanjutnya misi Biro Administrasi Pembangunan mengacu pada misi ke-1 (satu) dari 8 Misi Pembangunan Daerah (sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2017-2022) adalah :

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Aparatur Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) Serta Otonomi Khusus Yang Efektif.”

Prinsipnya bahwa Biro Administrasi Pembangunan mengacu pada misi pertama sebagai landasan kerja dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 56 tahun 2019, selanjutnya tetap mempedomani semua misi yang berkaitan dalam rangka pengembangan dan implementasi tugas lapangan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk di Papua Barat. Sehingga tugas-tugas dan realitas lapangan menjadi tolak ukur dalam merumuskan strategi maupun rencana program dan kegiatan pembangunan.

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA



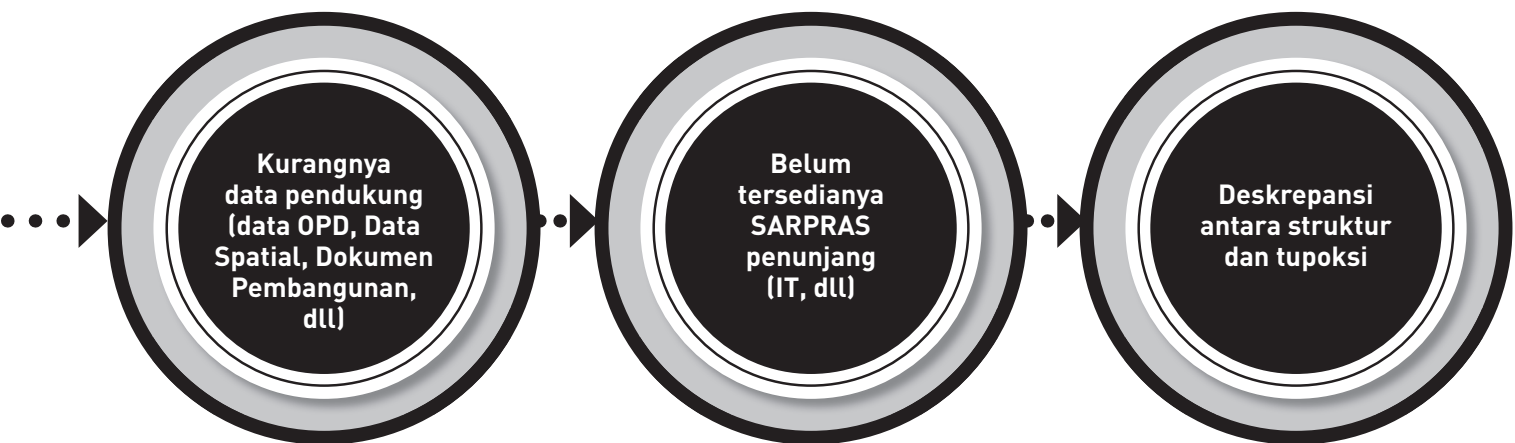
Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Tertibnya Dokumen Administrasi Pembangunan di Bidang Pengendalian Pembangunan Sumber Dana APBN dan APBD
2. Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah di Papua Barat
3. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Daerah dalam rangka Tertibnya Administrasi Pembangunan

Dengan kata kunci “Tertib Administrasi Pembangunan”

Arah Kebijakan

1. Menertibkan dokumen administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dokumen pembangunan daerah untuk setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD
2. Mengendalikan dokumen pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat
3. Evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah





2686-4827

Lahan Padi Sawah Desa Sidang Jaya Distrik Oransbari, Kab. Manokwari Selatan
Photo @Tjoe_Pandori